



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Siliwangi No. 113 Tlp (0231) 206011 - 206015 Fax. (0231) 206604
Email: inspektorat.crb@gmail.com
CIREBON

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Cirebon, 28 Maret 2019
Plt. Inspektur Kota Cirebon



H. GATOT SUBROTO SE, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19620621 198402 1 001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon ini disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah Kota Cirebon yaitu: "TERWUJUDNYA KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA YANG RELIGIUS, AMAN, MAJU DAN ASPIRATIF (RAMAH) PADA TAHUN 2018" sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Upaya untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi tersebut tentulah tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras berbagai pihak serta bersama-sama menghadapi rintangan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintah Kota Cirebon yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Mudah-mudahan segala harapan tersebut mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT, Amin.

Cirebon, Maret 2019

WALIKOTA CIREBON,

Drs. H. Washrudin Azis, SH.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| Kata Pengantar..... | 1 | |
| DAFTAR ISI..... | 2 | |
| Daftar Tabel..... | 3 | |
| BAB I | | |
| PENDAHULUAN..... | | 4 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 4 | |
| 1.2. Maksud dan Tujuan..... | 6 | |
| 1.3. Dasar Hukum | 7 | |
| 1.4. Struktur Organisasi | 8 | |
| 1.5. Isu Strategis | 9 | |
| 1.6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | 20 | |
| BAB II | | |
| PERENCANAAN KINERJA | | 21 |
| 2.1. Perencanaan Strategis..... | 21 | |
| 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | 38 | |
| BAB III | | |
| AKUNTABILITAS KINERJA..... | | 45 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... | 45 | |
| 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 55 | |
| 3.3. Evaluasi dan Analisis Anggaran | 131 | |
| BAB IV | | |
| PENUTUP | | 167 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Daftar Tabel

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran..... | 23 |
| Tabel 2. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran | 26 |
| Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon | 31 |
| | |
| Tabel 3. 1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja | 46 |
| Tabel 3. 2 Capaian target dan realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 | 47 |
| Tabel 3. 3 Perbandingan Pencapaian Target Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 | 111 |
| Tabel 3. 4 Tabel Penggunaan Anggaran dan Program | 132 |
| Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 | 156 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan gambaran akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Kinerja Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki peran strategis dalam mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja. Di era transparansi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah mekanisme pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pemerintah daerah mendapatkan ruang kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Kota Cirebon mendapatkan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

delegasi untuk menyelenggarakan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Statistik, Bidang Persandian, Bidang Kebudayaan, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Pembagian Urusan Bidang kelautan dan Perikanan, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat. Berbekal berbagai target kinerja sebagaimana telah diformulasikan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

dalam indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bertekad untuk menyampaikan informasi capaian Daerah kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada masyarakat pada umumnya dan warga Kota Cirebon pada khususnya secara baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Tahun 2018 ini memberikan gambaran dan menjelaskan secara utuh dan komprehensif pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2018 sekaligus juga menggambarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pencapaian visi dan misi yang sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018, sehingga dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dideskripsikan apa saja yang sudah dilakukan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan di Kota Cirebon.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pelaporan kinerja pemerintah daerah kota Cirebon dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2018 sesuai dengan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja terukur yang telah dan seharusnya dicapai, dan menyediakan media tolak ukur capaian kinerja dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kota Cirebon.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKIP Kota Cirebon, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah;
6. Peraturan daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Kota Cirebon;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
9. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2014-2018.
10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon membentuk organisasi perangkat daerah dengan komposisi sebagai berikut

- a. Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
- b. Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. Dinas Pemadam Kebakaran;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- o. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- r. Dinas Lingkungan Hidup; dan
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- t. Inspektorat Kota Cirebon;
- u. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- v. Badan Keuangan Daerah;
- w. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- x. Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
- y. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- z. Satuan Polisi Pamong Praja.
- aa. Kecamatan sebanyak 5 Kecamatan.

1.5. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, sebagai berikut:

a. Lingkungan Hidup

Pembangunan harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

evaluasi. Beberapa isu dalam urusan Lingkungan Hidup yang harus menjadi perhatian adalah:

- 1) Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pengendalian pencemaran air (air tanah dan air permukaan), serta pengendalian pencemaran udara dan kebisingan.
- 2) Pengendalian kerusakan lingkungan meliputi :
 - Pengendalian erosi, Abrasi dan akresi pantai,
 - Pengendalian penurunan muka tanah (deplesi) dan intrusi air laut,
 - Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut
 - Terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- 3) Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang memberikan dampak pada peningkatan kerentanan wilayah Kota Cirebon yang merupakan kota dengan kondisi topografi berupa dataran rendah dan pesisir. Selain itu, perubahan iklim akan meningkatkan potensi dan kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian iklim ekstrim dan bencana hidrometrologis seperti banjir rob. Dampak lain dari perubahan iklim juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat miskin perkotaan terutama yang tinggal di kawasan pesisir. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam mewujudkan hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan informasi terkait dengan kondisi iklim dan rancang ulang seluruh aspek-aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

4) Penanggulangan Bencana

Berbagai potensi bencana hampir dapat dipastikan selalu mengancam Kota Cirebon. Berbagai potensi bencana tersebut antara lain banjir (termasuk rob dan genangan), tanah longsor, pohon tumbang dan kebakaran. Perlu upaya peningkatan mitigasi bencana khususnya bagi masyarakat untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian materi yang lebih besar.

b. Pengelolaan Sampah

Dalam sektor kebersihan, faktor-faktor yang menjadi isu antara lain :

- 1) Volume atau laju timbulan sampah yang setiap tahun meningkat.
- 2) Pola pelayanan yang masih menggunakan pola lama yaitu kumpul, angkut, buang.
- 3) Regulasi dan penegakan hukum yang masih lemah.
- 4) Peran serta masyarakat yang masih harus ditingkatkan.
- 5) Keterbatasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPPA) Sampah.
- 6) Pemanfaatan sampah untuk produk industri kreatif.

c. Pekerjaan Umum

Infrastruktur wilayah termasuk jalan beserta saluran drainasenya dan jembatan, serta prasarana sumberdaya air dan jaringannya yang cukup dan baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan peluang positif bagi pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial budaya suatu daerah. Pembangunan dan upaya peningkatan sektor pekerjaan umum selama ini sudah dilakukan dan akan tetap menjadi perhatian serius di masa mendatang.

Infrastruktur di wilayah selatan Kota Cirebon dan wilayah yang berbatasan dengan daerah lain kondisinya masih relatif kurang dibanding dengan wilayah perkotaan. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat perekonomian, pendidikan dan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

kesehatan, sehingga angka IPM di wilayah ini tercatat merupakan yang terendah di Kota Cirebon.

Pada tahap 2013-2018 ini, pembangunan maupun pengembangan infrastruktur yang perlu menjadi prioritas perhatian diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengendalian banjir dan antisipasi pasang laut/rob Banjir, rob, dan genangan merupakan ancaman bencana yang menjadi isu yang harus diprioritaskan penanganannya. Bencana tersebut diakibatkan oleh banjir kiriman, hujan lokal, dan kenaikan muka air laut. Penanganannya masing-masing berbeda namun harus menjadi satu kesatuan strategi.
- 2) Tingginya tingkat kerusakan jalan, termasuk saluran drainase dan prasarana jalan.
- 3) Masih terbatasnya prasarana jalan di Wilayah Selatan (Kelurahan Argasunya), perlu upaya untuk dapat memperlebar jembatan tol yang ada sehingga lebih representatif.
- 4) Perlunya mengantisipasi tingkat kemacetan jalan yang semakin padat, khususnya pada perlintasan sebidang dengan moda transportasi lain (kereta api).
- 5) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air di wilayah selatan (kelurahan Argasunya).
- 6) Ketergantungan pada sumber air Pantiis sebagai sumber air baku PDAM Kota Cirebon yang melayani kebutuhan air bersih skala Kota.
- 7) Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perumahan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.

d. Penataan Ruang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan dan mengoperasionalkan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas.

Penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya akan dapat berjalan baik bilamana aturan mainnya dapat ditegakkan secara konsisten dan terkendali dalam situasi pembangunan yang semakin menggeliat. Oleh karena itu, beberapa permasalahan terkait urusan penataan ruang yang perlu menjadi perhatian pada periode tahun 2013-2018 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan peraturan daerah terkait aspek-aspek pengendalian ruang seperti rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, perangkat hukum (sanksi), perizinan dan insenti-disinsentif yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota.
2. Diperlukan langkah strategis untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% per satuan luas wilayah yang secara ekologis berfungsi untuk meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, selain fungsi sosial ekonomi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan landmark. untuk Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal
3. Perlu pengendalian perijinan pada wilayah yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan yang sudah menurun.
4. Perlu ditetapkannya kebijakan *Green Building*
5. Kurang optimalnya pengelolaan aset pemerintah sebagai fungsi RTH.

e. Perumahan

Perumahan dan permukiman yang baik seharusnya memiliki infrastruktur dasar yang baik agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Infrastruktur tersebut antara lain air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, kelayakan kondisi rumah dan lingkungan permukimannya. Beberapa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

permasalahan terkait urusan perumahan yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan ruang publik. Masih terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori kumuh.
- 2) Perlunya penataan dan pengembangan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat keterbatasan lahan dan tingginya nilai lahan.
- 3) Perlu optimalisasi penataan Tempat Pemakaman Umum.

f. Perhubungan

Permasalahan pembangunan urusan perhubungan pada periode tahun 2013-2018 yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah :

- 1) Kemacetan lalu lintas yang diakibatkannya oleh padatnya kendaraan juga prediksi kemacetan akan semakin meningkat seiring dengan berfungsinya duo double track kereta api yang melintasi Kota Cirebon.
- 2) keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan khususnya di wilayah selatan dan perbatasan kota.
- 3) Kondisi kuantitas dan kualitas angkutan umum yang memerlukan pembenahan.
- 4) Tingkat keselamatan berlalu lintas yang harus ditingkatkan.
- 5) perlunya moda transportasi massal yang nyaman dan representatif.
- 6) keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana perparkiran.



g. Komunikasi dan Informasi

Permasalahan pembangunan urusan komunikasi dan informasi pada periode tahun 2013-2018 yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah:

1. Keterbukaan informasi publik
2. Perkembangan Teknologi Informatika (E-Gov dan E-city)

h. Pertanahan

Tertibnya administrasi pertanahan merupakan salah satu indikator kepastian kepemilikan lahan. Permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian pada periode tahun 2013-2018 untuk urusan pertanahan, sebagai berikut :

- 1) Belum tuntasnya penetapan batas wilayah dengan Kota.
- 2) Administrasi kepemilikan tanah termasuk asset tanah pemerintah daerah belum tertib.
- 3) Belum adanya master plan tanah timbul.
- 4) Penataan aturan penerbitan sertifikat tanah timbul.
- 5) Penguatan kelembagaan pengelolaan tanah timbul.

i. Energi dan Sumber daya mineral

Permasalahan terkait urusan Energi dan Sumberdaya Mineral yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap penambangan galian C liar
- 2) Belum optimalnya elektrifikasi rumah tangga.

j. Kesehatan

Perubahan iklim global menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan guna lahan secara lokal yang berdampak terhadap menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Penyakit-penyakit yang terjadi akibat perubahan iklim cenderung meningkat dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Upaya preventif perlu dilakukan sejak sekarang dengan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

mengembalikan dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan sekitar diantaranya dengan meningkatkan standar kualitas sanitasi masyarakat.

Dengan meningkatnya karakteristik urban yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan dan pusat aktifitas kota, akan mengakibatkan bertambahnya jam kerja seseorang. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap makanan yang siap saji atau makanan yang disajikan di luar rumah. Data yang ada menunjukkan kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular pada masyarakat kota termasuk Kota Cirebon. Hal ini menunjukkan terjadi transisi penyakit epidemiologi dari penyakit menular ke tidak menular. Hal penting yang perlu dilakukan diantaranya dengan Upaya kesehatan masyarakat promotif dan preventif dengan menjalankan kuratif dan rehabilitatif.

k. Pendidikan

Sebagai daerah yang telah menganggarkan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen, Kota Cirebon termasuk yang memiliki angka indeks pendidikan tertinggi se wilayah Ciayumajakuning. Rata-rata lama sekolah mendekati 10 (sepuluh) tahun, namun ini masih jauh dari target rata-rata lama sekolah Kota Cirebon yaitu 12 tahun. Angka putus sekolah terutama untuk tingkat SMA masih jauh dari harapan sementara untuk tingkat SD dan SMP sudah sesuai target. Salah satu aspek penting untuk menurunkan angka putus sekolah adalah dengan mengalokasikan biaya operasional sekolah hingga tingkat SMA.

Untuk mengejar ketertinggalan dan mempertahankan rata-rata lama sekolah yang ada, maka perlu dicanangkan wajib belajar bukan hanya hingga 12 tahun tetapi hingga 15 tahun sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kota Cirebon adalah setingkat SMA. Selain itu untuk membantu masyarakat Kota Cirebon yang akan melanjutkan jenjang pendidikan menengah ke pendidikan tinggi, pemerintah kota perlu mengalokasikan anggaran untuk beasiswa perguruan tinggi bagi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

warga kota yang akan melanjutkan pendidikan terutama untuk kalangan tidak mampu.

Isu strategis lainnya di bidang pendidikan mencakup mutu tenaga pendidik yang diharapkan selama lima tahun ke depan 90 persen tenaga pendidik di Kota Cirebon telah bersertifikasi.

I. Sosial

Salah satu isu strategis di bidang sosial adalah soal kemiskinan. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, pendataan yang masih belum seragam menjadi salah satu kendala dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam pelayanan kesehatan keluarga miskin. Dengan diterapkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai tahun 2014 maka perlu ditingkatkan upaya-upaya untuk mendukung pemberlakuan program tersebut.

Angka pengangguran yang cukup tinggi perlu upaya peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat, selain terkait pula dengan tingkat pendidikan. Peningkatan daya saing masyarakat Kota Cirebon perlu dilakukan mengingat pada tahun 2015 akan diterapkan *Asean Free Trade*.

Sebagai salah satu kota dengan lahan yang minim pertanian dan perkebunan, maka aspek ketahanan pangan bagi Kota Cirebon menjadi penting. Oleh karena itu perlu diupayakan perlindungan terhadap kawasan-kawasan produktif pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.

m. Perlindungan Anak Perempuan

Isu strategis dalam perlindungan anak dan perempuan adalah perlunya membangun pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, serta pentingnya pemahaman pengarusutamaan gender, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Isu strategis lainnya dalam perlindungan anak dan perempuan adalah perlunya membangun kesadaran mulai dari tingkat bahwa terutama di tingkat RT atau RW. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya membuat kawasan percontohan RW ramah anak atau RT ramah anak. Selain itu di tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum perlu diupayakan pula untuk menjadi ramah anak misalnya di terminal dan stasiun Kereta Api.

n. Aspek Ekonomi Keuangan

Beberapa isu strategis dalam bidang ekonomi keuangan adalah:

- 1) Perlunya penyederhanaan perizinan, insentif dan disinsentif investasi, dan penerapan sanksi pelanggaran tata ruang, hal ini terkait dengan investasi yang berkembang semakin pesat di Kota Cirebon.
- 2) Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, terutama dengan melibatkan lingkungan alternatif misalnya pondok pesantren, mesjid, dan kelompok pemuda.
- 3) Penanganan sektor informal terutama pedagang kaki lima dengan mengalokasikan ruang, baik yang sudah dimiliki atau membebaskan baru untuk keberadaan PKL dalam rangka pembinaan sektor informal menjadi formal.
- 4) Pelestarian budaya dan aset wisata daerah terutama dengan banyaknya potensi wisata ziarah dan berbasis keislaman di Kota Cirebon.

o. Aspek Pemerintahan

Dalam rangka mendukung kinerja Pelayanan Pemerintahan Kota Cirebon diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara optimal. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk itu, diperlukan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

penegakan hukum, pengendalian ketenteraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi aman, tenteram, tertib dan teratur. Selain itu, diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana termasuk potensi terjadinya kebakaran. Kondisi yang tenteram dan tertib dapat dicapai melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

Untuk mendukung kinerja Pemerintahan Kota Cirebon, diperlukan pembiayaan pembangunan yang signifikan. Walaupun dari tahun ke tahun APBD Kota Cirebon cenderung meningkat namun belum mampu membiayai pembangunan secara keseluruhan sesuai kebutuhan. Seiring dengan penerapan prinsip *good governance*, akuntabilitas keuangan daerah kondisinya semakin baik sehingga dimungkinkan untuk menggali potensi pembiayaan non-konvensional. Pembiayaan pembangunan non-konvensional dilakukan melalui peran serta masyarakat dan dunia usaha yang proporsional untuk mendukung pembiayaan pembangunan melalui penerbitan surat berharga (obligasi), skema *Public Private Partnership* (PPP), maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta skema lainnya dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang handal.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

badan usaha daerah dan swasta serta lembaga- lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Terkait dengan indeks persepsi korupsi yang masih belum memenuhi standar, maka diperlukan upaya konsisten untuk melaksanakan dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang telah disahkan melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kota Cirebon 2012 – 2017. Selain upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan walikota tersebut.

1.6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon, berbagai hal dirumuskan untuk mengatasi isu strategis tahun 2018. Adapun prioritas pembangunan yang telah ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi
4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata dan berkelanjutan
5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

a. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Adapun Visi Kota Cirebon 2013-2018 yang telah dicanangkan 2013-2018 adalah “ **Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018**”.

Pernyataan visi tersebut memiliki 5 (lima) kata utama yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Cirebon pada akhir tahun 2018. Penjelasan masing-masing kata tersebut, adalah sebagai berikut:

Religius

Makna religius berarti bahwa Pemerintah dan Masyarakat Kota Cirebon dalam melaksanakan aktivitasnya baik dalam kehidupan keluarga, bertetangga maupun dalam pekerjaannya sehari-hari senantiasa berlandaskan pada norma dan syariat agama yang dianutnya. Sikap hidup yang religius adalah sikap hidup yang menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Aman

Kota Cirebon menjadi kota yang aman, yaitu kota yang bebas dari berbagai bahaya yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta penyakit – penyakit masyarakat (pekat). Dalam kondisi yang seperti itu, seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan

terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan ini, maka upaya penciptaan kamtibmas secara optimal menjadi prioritas pembangunan, karena hal itu akan mempengaruhi kondusivitas bidang-bidang pembangunan lainnya.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Maju

Kota Cirebon menjadi kota yang maju, artinya kota yang berkembang ke arah yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupannya. Kota yang maju adalah kota yang memiliki daya saing tinggi di dibandingkan dengan kemajuan kota-kota lain di kawasan regional maupun nasional. Untuk itu, pelaksanaan seluruh aspek pembangunan di kota Cirebon harus berorientasi pada kemajuan dan peningkatan daya saing di segala bidang, dengan berbasis pada sistem budaya dan kearifan lokal, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Cirebon.

Aspiratif

Kota Cirebon menjadi kota yang aspiratif, yaitu kota yang berbasis pada aspirasi masyarakat. Dengan visi ini, maka perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan senantiasa memperhatikan aspirasi dan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Berbagai unsur yang dapat diserap aspirasinya atau diminta keterlibatannya antara lain adalah pihak swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, pers/media, lembaga swadaya masyarakat, kelompok perempuan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemangku adat, para budayawan, organisasi kemasyarakatan, dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Hijau

Kota Cirebon menjadi kota hijau, artinya kota yang rimbun, sejuk, bersih, dan asri. Dengan visi ini, maka pembangunan kota Cirebon senantiasa berorientasi dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Taman-taman kotanya tampak indah dan asri, jalan-jalannya bersih, trotoarnya tertata rapi, halaman kantor dan perumahan perumahannya hijau.

Untuk mencapai visi tersebut, kepala daerah menyusun misi-misi dengan rumusan sebagai berikut.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Misi Ke-1: “Mewujudkan aparaturn pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius”

Misi Ke-2: “Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparaturn serta merevitalisasikelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN”

Misi Ke-3: “Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum”

Misi Ke-4: “Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat”

Misi Ke-5: “Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan”

Misi Ke-6: “Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup”

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dirumuskan dari penjelasan visi dan misi Kota Cirebon 2008-2013 yang kemudiandijabarkan dalam standar kinerja yang harus dicapai pada Sasaran. Hasil perumusan tujuan dan sasaran disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran

| No. | Tujuan | Sasaran |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada aparaturn pemerintahan. | Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada aparaturn pemerintahan. |
| 2. | Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada masyarakat. | <ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan.➤ Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan.➤ Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No. | Tujuan | Sasaran |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing. |
| 3. | Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur daerah, pencapaian target pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas APBD | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional. ➤ Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD. ➤ Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah. ➤ Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan. ➤ Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan. |
| 4. | Meningkatkan penataan struktur dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah agar berfungsi optimal. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD |
| 5. | Membangun suasana pemerintahan yang harmonis, mangayomi dan komunikatif. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tercapainya kesepakatan penetapan batas wilayah dengan Kota Cirebon |
| 6. | Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilindungi pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi |
| 7. | Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta bangsa dan tanah air Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam Bhineka Tunggal Ika |
| 8. | Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum |
| 9. | Menegakkan peraturan dan perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunnya tingkat pelanggaran perda |
| 10. | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aspek kebersihan, keindahan, ketertiban dan keagamaan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya RW K-3 |
| 11. | Meningkatkan tertib lalu lintas dan perparkiran | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan |
| 12. | Meningkatkan penataan sektor informasi untuk mendukung | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertatanya sektor informasi |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Tujuan | Sasaran |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ketertiban dan keindahan kota | |
| 13. | Meningkatkan daya tanggap pemerintah dan masyarakat terhadap situasi bencana | ➤ Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana |
| 14. | Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat | ➤ Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan |
| 15. | Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat | ➤ Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat. ➤ Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk |
| 16. | Meningkatkan olah raga prestasi | ➤ Berprestasi ditingkat provinsi |
| 17. | Mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota pusaka | ➤ Meningkatkan jumlah pusaka budaya yang dilestarikan |
| 18. | Meningkatkan daya beli masyarakat | ➤ Meningkatnya indeks daya beli masyarakat |
| 19. | Menurunkan jumlah keluarga miskin | ➤ Menurunnya jumlah KK miskin |
| 20. | Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak | ➤ Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak |
| 21. | Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial | ➤ Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial |
| 22. | Meningkatkan pengarusutamaan gender | ➤ Terpenuhinya kesetaraan gender |
| 23. | Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan | ➤ Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang Kecamatan. ➤ Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW |
| 24. | Mewujudkan lingkungan kota bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota | ➤ Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permukiman ➤ Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. ➤ Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA |
| 25. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan | ➤ Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No. | Tujuan | Sasaran |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>pergerakan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim. ➤ Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal ➤ Tersedianya sistem pengelolaan air minum |
| 26. | Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap tata ruang kota | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten |
| 27. | Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan ➤ Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni ➤ Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang. |

Tabel 2. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

| No. | Misi | Tujuan | Sasaran |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi : "Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun2018 | | | |
| 1. | Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius | a. Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan. | a. Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan. |
| | | b. Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan. b. Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan. c. Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No. | Misi | Tujuan | Sasaran |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dansaling menghargaiterhadapajaran agamanya masing-masing. |
| 2. | Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN | <p>a. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur daerah, pencapaian target pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas APBD</p> <p>b. Meningkatkan penataan struktur dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah agar berfungsi optimal.</p> <p>c. Membangun suasana pemerintahan yang harmonis, mangayomi dan komunikatif.</p> <p>d. Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif,</p> | <p>a. Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional.</p> <p>b. Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD.</p> <p>c. Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah.</p> <p>d. Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan.</p> <p>e. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan.</p> <p>a. Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD.</p> <p>b. Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>a. Tercapainya kesepakatan penetapan batas wilayah dengan Kota Cirebon.</p> <p>a. Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.</p> |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No. | Misi | Tujuan | Sasaran |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | efisien, transparan dan akuntabel. | |
| 3. | Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum | a. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta bangsa dan tanah air Indonesia. | a. Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam Bhineka Tunggal Ika. |
| | | b. Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat. | a. Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum. |
| | | b. Menegakkan peraturan dan perundang-undangan | a. Menurunnya tingkat pelanggaran perda |
| | | b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aspek kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan. | a. Terwujudnya RW K-3 |
| | | b. Meningkatkan tertib lalu lintas dan perpakiran | a. Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan |
| | | b. Meningkatkan penataan sektor informal untuk mendukung ketertiban dan keindahan kota | a. Tertatanya sektor informal |
| | | b. Meningkatkan daya tanggap pemerintah dan masyarakat terhadap situasi bencana | a. Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana |
| 4. | Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, | a. Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. | b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No. | Misi | Tujuan | Sasaran |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat | c. Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat. | b. Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat |
| | | | c. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk |
| | | d. Meningkatkan olah raga prestasi | a. Berprestasi di tingkat provinsi |
| | | e. Mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Pusaka | a. Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan |
| | | f. Meningkatkan daya beli masyarakat | a. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat |
| | | g. Menurunkan jumlah keluarga miskin | a. Menurunnya jumlah KK miskin |
| | | h. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak | a. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak |
| | | i. Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial | a. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial |
| | | j. Meningkatkan pengarusutamaan gender | a. Terpenuhiya kesetaraan gender |
| | | 5. | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan |
| 6. | Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan | a. Mewujudkan lingkungan Kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi | a. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permukiman. |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No. | Misi | Tujuan | Sasaran |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | hidup | warga kota. | b. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup |
| | | | c. Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA |
| | | b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan | a. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat. |
| | | | b. Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim |
| | | | c. Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal |
| | | | d. Tersedianya sistem pengelolaan air minum |
| | | c. Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap tata ruang kota | a. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten |
| | | b. Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan | a. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan. |
| | | | b. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni. |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Misi | Tujuan | Sasaran |
|-----|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | c. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang. |

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kota Cirebon menetapkan 42 sasaran strategis yang mencakup 55 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2014-2018. Adapun rincian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon

| Sasaran | | Indikator Kinerja Utama | |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan | a. | Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD |
| 2. | Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan | a. | Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya |
| 3. | Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan | | Prestasi lomba keagamaan 3 besar tingkat provinsi |
| 4. | Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat | | Tidak adanya kasus konflik |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| Sasaran | | Indikator Kinerja Utama | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing | | yang bernuansa agama |
| 5. | Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional | a. | Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan |
| | | b. | Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS |
| 6. | Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD | a. | Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di tahun 2018 |
| | | b. | Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100 % |
| 7. | Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah | a. | Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan |
| | | b. | Meningkatnya arsip vital dan arsip statis |
| 8. | Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan | a. | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan |
| | | b. | Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon |
| 9. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan | a. | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| Sasaran | | Indikator Kinerja Utama | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD | a. | Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di tahun 2018 |
| 11. | Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kota Cirebon | a. | Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100 % |
| 12. | Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi | a. | Tersedianya peraturan-peraturan tentang e-government 100% |
| | | b. | Terpenuhinya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100% |
| 13. | Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam kebhineka tunggal-ika-an | a. | Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus |
| 14. | Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum | a. | Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik |
| 15. | Menurunnya tingkat pelanggaran perda | a. | Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 Perda bisa ditegakkan |
| 16. | Terwujudnya RW K-3 | a. | Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50 % |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| Sasaran | | Indikator Kinerja Utama | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan | a. | Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan |
| 18. | Tertatanya sektor informal | a. | Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya =0,3 |
| 19. | Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana | a. | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana (TKB) dan waktu tanggap darurat bencana (TDB) |
| 20. | Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan | a. | Meningkatnya Lama Harapan Sekolah pada usia max 18 tahun |
| | | b. | Rata - rata lama sekolah (13 Tahun) |
| 21. | Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat | a. | Angka harapan hidup 71,1 tahun |
| 22. | Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk | a. | Meningkatnya Peserta KB Aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS |
| 23. | Berprestasi di tingkat provinsi | a. | Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018 |
| 24. | Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan | a. | Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| Sasaran | | Indikator Kinerja Utama | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | b. | Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 Jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012) |
| 25. | Meningkatnya indeks daya beli masyarakat | a. | Indeks daya beli dari 62,35 menjadi 65 point |
| | | b. | Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 |
| 26. | Menurunnya jumlah KK miskin | a. | rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota dari 30,24% menjadi 25% |
| 27. | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | a. | Jumlah kasus dari 30 kasus menjadi 20 kasus |
| 28. | Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | a. | Penurunan PMKS 5 % di Tahun 2018 |
| 29. | Terpenuhinya kesetaraan gender | a. | Rasio gender di atas 30% perempuan |
| 30. | Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan | a. | Persentase kenaikan nilai Musrenbang Kecamatan yg diakomodir dalam APBD sebanyak 5 % sampai akhir tahun 2018 (kumulatif) |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| Sasaran | | Indikator Kinerja Utama | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW | a. | Prosentase Swadaya Masyarakat sebesar 10 % terhadap jumlah bantuan RW |
| 32. | Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permakaman | a. | luas ruang terbuka hijau publik menuju 12 % pada akhir tahun 2018 |
| 33. | Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup | a. | Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome) |
| | | b. | Prosentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Baku Mutu Lingkungan (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%) |
| | | c. | Meningkatnya pelayanan Konservasi SDA (Rata-rata Outcome) |
| | | d. | Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome) |
| 34. | Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA | a. | Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80% |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| Sasaran | | Indikator Kinerja Utama | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 35. | Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat | a. | Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% |
| | | b. | Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100 % |
| 36. | Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim | a. | Berkurangnya Titik Rawan Genangan Banjir dari 18 titik menjadi 10 titik |
| 37. | Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal | a. | Cakupan pelayanan air limbah domestik 92% menjadi 100% |
| | | b. | Jumlah jamban dan septiktank 76, 45 % (65.766 Rumah Tangga) |
| 38. | Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum | a. | Cakupan pelayanan air minum non perpipaan |
| 39. | Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten | a. | Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus |
| 40. | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan | a. | berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh 20 % |
| 41. | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | a. | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| Sasaran | | Indikator Kinerja Utama | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 42. | Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang | a. | Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum |

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cirebon adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Meningkatnya implementasi nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan | Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100% | 100 |
| 2. | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan | Rasio tempat ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana dibandingkan dengan tempat ibadah yang mengusulkan bantuan sarana dan prasarana | 90% |
| 3. | Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan | Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi | 6 besar tingkat provinsi |
| 4. | Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing. | Tidak adanya kasus konflik bernuansa keagamaan | 0% |
| 5. | Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki | 1. Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan | 100% |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | integritas dan profesional | 2. Menurunnya pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun | 3 kasus/1000 PNS |
| 6. | Terwujudnya tertib administrasi keuangan | Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 | WTP |
| 7. | Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD | Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan | 100% |
| 8. | Terwujudnya administrasi kearsipan daerah | 1. Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan | 14/70 |
| | | 2. Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1060 arsip | 1060 arsip digital |
| 9. | Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan 90% | 90 poin |
| 10. | Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi | Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon | 400 M (PMA) 600 M (PMDN) |
| 11. | Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan | 90 Poin |
| 12. | Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang representatif | Jumlah bangunan dan gedung pemerintahan dalam kondisi baik | 80% |
| 13. | Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan | 80 poin |
| 14. | Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kota Cirebon | Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati 100% | 25 titik |
| 15. | Terwujudnya penataan sistem manajemen dan | 1. Tersedianya peraturan-peraturan tentang e-government 100% | 100% (1 peraturan e-government) |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi | 2. Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100% | 50 sistem yang terbangun |
| 16. | Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an | Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus | 0 kasus |
| 17. | Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum | 1. Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk | 15% |
| | | 2. Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban dan umum 15% setiap tahun dari 45 titik | 10 titik |
| 18. | Terwujudnya RW K-3 | Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50% | 50% |
| 19. | Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan | Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan | 6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan |
| 20. | Tertatanya sektor informal | Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya 40% | 40% |
| 21. | Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari |
| 22. | Terbukanya kesempatan yang luas bagi | 1. Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun | 18 Tahun |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | masyarakat untuk mengenyam | 2. Rata-rata lama sekolah (13tahun) | 13 Tahun |
| 23. | Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat | 1. BOR (%) | 80,64 |
| | | 2. LOS (hari) | 4,48 |
| | | 3. TOI (hari) | 1,27 |
| | | 4. BTO (kali) | 43,35 |
| | | 5. NDR (kematian 48 jam/1000) | 22,56‰ |
| | | 6. GDR (kematian kasar/1000) | 44,28‰ |
| | | 7. Survei kepuasan pasien/pelanggan | 85% |
| | | 8. KK ber-PHBS | 75% |
| | | 9. Angka kematian Ibu | 3 orang |
| | | 10. Angka kematian bayi | 50 bayi |
| | | 11. Gizi buruk | <1% |
| | | 1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin | 100% |
| | | 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (%) | 77,50% |
| | | 24. | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk |
| 25. | Terwujudnya prestasi olahraga di tingkat provinsi | Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018 | 10 besar tingkat provinsi |
| 26. | Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan | 1. Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 | 50% |
| | | 2. Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 cagar bangunan di tahun 2012) | 80% |
| 27. | Meningkatnya indeks daya beli masyarakat | 1. Indeks daya beli | 65 |
| | | 2. Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 | 4444.959 orang |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 28. | Menurunnya jumlah KK miskin | Rasio KK miskin dibandingkan KK kota | 25% |
| 29. | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Menurunnya kasus | 53 kasus |
| 30. | Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial | Jumlah penanganan PMKS 5% pada tahun 2018 | 5% (3.685 orang) |
| 31. | Terpenuhinya kesetaraan gender | Rasio gender di atas 30 % perempuan | 40% |
| 32. | Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan | Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif) | 5% |
| 33. | Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW | Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW | 10% |
| 34. | Meningkatnya luasan dan kualitas ruangan terbuka hijau publik dan privat | Meningkatnya luas ruangan terbuka hijau menuju 12% | 9,81% |
| 35. | Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup | 1. Meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome) | 90% |
| | | 2. Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%) | 78% |
| | | 3. Air sungai (lokasi) meningkatnya pelayanan konservasi | 100% |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | SDA (rata-rata outcome) | |
| | | 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome) | 80% |
| 36. | Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA | 1. Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80% | 80% |
| | | 2. Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste baik 100% | 100% |
| 37. | Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat | 1. Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% | 100% |
| | | 2. Proporsi jumlah jembatan kondisi baik | 100% |
| 38. | Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim. | Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik | 10 titik |
| 39. | Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal | 1. Cakupan pelayanan air limbah domestik | 100% |
| | | 2. Jumlah jamban dan septiktank 76,45% (65,766 rumah tangga) | 76,45% |
| 40. | Tersedianya sistem pengelolaan air minum | Cakupan pelayanan air minum perpipaan | 80% |
| 41. | Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten | Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus | 0 kasus |
| 42. | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan | Berkurangnya kawasan lingkungan pemukiman kumuh menjadi 20% | 20% |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 43. | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | 16.256 rumah |
| 44. | Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang | Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum | 90% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cirebon. setiap akhir tahun setiap instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2018 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas perjanjian kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2013-2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Tabel 3. 1Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \geq$ | Sangat tinggi |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat rendah |

Pelaksanaan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon merupakan penerapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, dan tahun 2018 merupakan tahun ke-5 dengan berdasarkan RPJMD tersebut.

Secara umum pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama tahun 2018 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Tabel 3. 2Capaian target dan realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % PENCAPAIAN SASARAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Misi ke-1 "Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius" | | | | | |
| | Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan | Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100% | 100% | 45% | 45% |
| | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan | Rasio tempat ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana dibandingkan dengan tempat ibadah yang mengusulkan bantuan sarana dan prasarana peribadatan | 90% | n/a | |
| | Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan | Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi | 6 besar tingkat provinsi | n/a | |
| | Terciptanya suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing | Tidak ada kasus konflik bernuansa keagamaan | 0% | 0% | 100% |
| Misi ke-2 "Meningkatkan nilai integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas KKN" | | | | | |
| | Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional | Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan | 100% | 72% | 72% |
| | | Menurunnya pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun | 3 kasus / 1000 PNS | 4 kasus / 1000 PNS | 66,67% |
| | Terwujudnya tertib administrasi keuangan | Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di tahun 2018 | WTP | WTP | 100% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % PENCAPAIAN SASARAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD | Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan | 100% | 98,90% | 98,9% |
| | Terwujudnya administrasi kearsipan daerah | Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan | 14/70 | n/a | |
| | | Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1060 arsip | 1060 arsip digital | n/a | |
| | Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan 90% | 90 poin | 78,87 poin | 87,63% |
| | Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi | Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon | 400 M (PMA) 600 M (PMDN) | 1.733 M (PMA) 1.620 M (PMDN) | 433,25% 270,33% |
| | Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan | 90 poin | n/a | |
| | Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang representatif | Jumlah bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik | 80% | 80% | 100% |
| | Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan sebesar | 80 poin | 80 poin | 100% |
| | Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon | Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati 100% | 25 titik | n/a | |
| | Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan | Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government 100% | 100% (1 peraturan e-government) | 100% (4 peraturan 3-government) | 100% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % PENCAPAIAN SASARAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| | mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi | | | | |
| | | Terpenuhinya teknologi informasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100% | 50 sistem yang terbangun | 22 sistem yang terbangun | 44% |
| | terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an | Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 100% |
| | Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum | Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk | 15% | n/a | |
| | | Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban dan umum 15% setiap tahun dari 45 titik | 10 titik | 20 titik | 100% |
| | Terwujudnya RW K-3 | Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50% | 50% | 50% | 100% |
| | Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan | Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan | 6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan | 6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan | 100% |
| | Tertatanya sektor informal | Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya 40% | 40% | 45,86% | 114,65% |
| | Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 | 100% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | % PENCAPAIAN SASARAN | |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| | | | | REALISASI | |
| | | | waktu tanggap darurat bencana 7 hari | menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | |
| | Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam | Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun | 18 tahun | 13,08 tahun | 72,66% |
| | | Rata-rata lama sekolah (13 tahun) | 13 tahun | 9,88 | 76% |
| | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | BOR (%) | 80,6 | 57,09 | 70,83% |
| | | LOS (hari) | 4,48 | 4,20 | 93,75% |
| | | TOI (hari) | 1,27 | 3,11 | 57% |
| | | BTO (kali) | 43,35 | 12,68 | 169,94% |
| | | NDR (Kematian 48 jam/1000) | 22,56 ‰ | 43,04 | 190,78% |
| | | GDR (kematian kasar/1000) | 44,28 ‰ | 75 | 169,37% |
| | | Survei kepuasan pasien/pelanggan | 85% | 81,43 | 95,8% |
| | | KK ber-PHBS | 75% | 75,22 | 100,29% |
| | | Angka kematian ibu | 3 orang | 3 | 100% |
| | | Angka kematian bayi | 50 bayi | 17 | 166% |
| | | Gizi buruk | < 1% | 0,17 | 100% |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin | 100% | 100% | 100% |
| | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (%) | 77,50% | 100 | 129,03% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % PENCAPAIAN SASARAN |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS | 75% | 63,11 | 84,11% |
| | Terwujudnya prestasi olahraga di tingkat provinsi | Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018 | 10 besar tingkat provinsi | 10 besar tingkat provinsi | 100% |
| | Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan | Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 | 50% | 40,15% | 80,3% |
| | | Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 cagar bangunan di tahun 2012) | 80% | 73% | 91,25% |
| | Meningkatnya indeks daya beli masyarakat | Indeks daya beli | 65 | n/a | |
| | | Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 | 444.959 orang | 1.808.544 orang | 406,45% |
| | Menurunnya jumlah KK miskin | Rasio KK miskin dibandingkan KK kota | 25% | n/a | |
| | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Menurunnya kasus | 53 kasus | 65 kasus | 122,64% |
| | Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial | Jumlah penanganan PMKS 5% pada tahun 2018 | 5% (3.685 orang) | n/a | |
| | Terpenuhinya kesetaraan gender | Rasio gender di atas 30% perempuan | 40% | 3% | |
| Misi ke-5: "meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan" | | | | | |
| | Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan | Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif) | 5% | n/a | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % PENCAPAIAN SASARAN |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------|
| | Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW | Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW | 10% | 10% | 100% |
| Misi ke-6: "meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup" | | | | | |
| | Meningkatnya luasan dan kualitas ruangan terbuka hijau publik dan privat | Meningkatnya luas ruang terbuka hijau menuju 12% | 9,81% | 1,9% | 77,33% |
| | | Dihapus | | | |
| | Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup | Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome) | 90% | 69,6 | 77,33% |
| | | Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan % (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%) | 78% | 77,5% | 99,35% |
| | | Air sungai (lokasi) meningkatnya pelayanan konservasi SDA (rata-rata outcome) | 100% | 79,6% | 79,6% |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome) | 80% | 69,6 | 87% |
| | Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA | Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80% | 80% | 80% | 100% |
| | | Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste baik 100% | 100% | n/a | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % PENCAPAIAN SASARAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| | Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat | Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% | 100% | 100% | |
| | | Proporsi jumlah jembatan kondisi baik | 100% | 100% | |
| | Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim | Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik | 10 titik | 8 titik | |
| | Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal | Cakupan pelayanan air limbah domestik | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah jamban dan septiktank 76,45% (65.766 rumah tangga) | 76,45% | 90,32% | 118,14% |
| | Tersedianya sistem pengelolaan air minum | Cakupan pelayanan air minum perpipaan | 80% | 75,89 | 94,86% |
| | Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten | Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 100% |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan | Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20% | 20 % | 24,4% | 122% |
| | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | 16.256 rumah | 846 rumah yang diperbaiki | 5,31% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % PENCAPAIAN SASARAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------------------|
| | Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang | Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum | 90% | 100% | 110% |

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 2018, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan.

Misi ke-1: “Mewujudkan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon yang Religius”

Pencapaian misi untuk mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius, telah ditetapkan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100% | % | 100 | 45 | 45% |

Sumber: LKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengawasan perilaku, sanksi dan pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas akhlak dan moral aparatur.

Arah kebijakan

- mewajibkan pemerintah melaksanakan kegiatan keagamaan, menyusun pedoman pemberian sanksi, operasi rutin PNS di tempat-



tempat hiburan dan membuka kotak pengaduan masyarakat terhadap perilaku PNS.

Program

- Program peningkatan kualitas religius aparatur

Pada tahun 2018, berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Cirebon, bahwa rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD adalah sebesar 45% dari target 100% yang diharapkan.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon selama tahun 2018, perangkat daerah yang melaksanakan pengajian rutin bulanan yaitu:

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Inspektorat;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
4. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
9. Dinas Pemadam Kebakaran;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Sekretariat DPRD;
12. Kecamatan Pekalipan;
13. Kecamatan Kejaksan;
14. Kecamatan Lemahwungkuk;
15. Kecamatan Kesambi; dan
16. Kelurahan Kalijaga



2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keagamaan

Sasaran strategis tersebut mempunyai indikator sasaran yaitu:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Rasio tempat ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana dibandingkan dengan tempat ibadah yang mengusulkan bantuan sarana dan prasarana | % | 90 | n/a | |

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah bansos serta kegiatan keagamaan.

Arah kebijakan

- Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bansos serta pelibatan pengurus masjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.

Program

- Program peningkatan kualitas sarana peribadatan.

3. Terwujudnya prestasi kota Cirebon bidang keagamaan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi | juara | 6 besar tingkat provinsi | n/a | |



Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pembinaan kepada generasi muda dalam lomba bidang keagamaan dan pelaksanaan lomba secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.

Arah kebijakan

- Pembinaan keagamaan kepada generasi muda dalam bentuk lomba dan festival keagamaan berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota.

Program

- Program peningkatan kompetensi keagamaan.

4. Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Tidak adanya kasus konflik bernuansa keagamaan | % | 0 | 0 | 100% |

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah dan bansos serta keagamaan.

Arah kebijakan

- Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bansos serta pelibatan pengurus mesjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.



Program

- Program kerukunan umat beragama.

Misi ke-2: “Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN”.

Pencapaian misi ke-2 sebagaimana tersebut di atas, telah ditetapkan sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan | % | 100 | n/a | |
| Menurunnya pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun | Kasus | 3 kasus/ 1000 PNS | 4 kasus / 1000 PNS | 66,67% |

Sumber: LKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah.
2. Penerapan *reward* dan *punishment* dalam disiplin PNS.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui peningkatan keahlian dan keterampilan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

2. Mengembangkan sistem kesejahteraan PNS berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan.
3. Melakukan pembinaan PNS secara berkala, penerapan *reward* dan *punishment*, pengawasan disiplin dan kotak pengaduan masyarakat.

Program

1. program pendidikan kedinasan.
2. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
3. program pembinaan dan pengembangan aparatur.

2. Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 | Opini | WTP | WTP | 100% |

Sumber: LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Optimalisasi pengelolaan aset daerah.
2. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.

Arah kebijakan

1. Melakukan penataan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas kelembagaan aset, integrasi sistem
2. Meningkatkan optimalisasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah.



3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan optimalisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP).

Program

1. Program optimalisasi pengelolaan aset daerah.
2. Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Program peningkatan kualitas penganggaran dan realisasi APBD.
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

3. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan | % | 100 | 98,90 | 98,9% |

Sumber: LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD.
3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.

Arah kebijakan

1. Menyepakati jadwal waktu perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif serta mempublikasikannya.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencana di setiap SKPD.
3. Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah.
4. Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.

Program

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Program pengembangan data/informasi perencanaan.
3. Program pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4. Program evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

4. Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan | Unit kerja | 14/70 | n/a | |
| Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1060 arsip | Arsip | 1060 arsip digital | n/a | |

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Peningkatan jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan.
2. Penyediaan arsip dalam bentuk digital.

Arah kebijakan

1. Melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang tertib arsip.



2. Menyediakan dokumen arsip secara digital.

Program

1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

5. Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan 90% | Poin | 90 | 78,87 | 87,6% |

Sumber: LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Optimalisasi kelembagaan pelayanan perizinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan.

Arah kebijakan

- Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perizinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi.

Program

1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menyelenggarakan proses pelayanan perizinan secara satu pintu, berdasarkan hasil survei



indeks kepuasan masyarakat, diketahui kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan perizinan terpadu masih belum sesuai target, hal tersebut disebabkan karena masih penyesuaian proses penerapan sistem perizinan terpadu yang terintegrasi secara elektronik melalui aplikasi online single submission (OSS). Penerapan OSS merupakan salah satu inovasi dari pemerintah pusat dalam penerapan proses perizinan namun dalam pelaksanaannya di daerah masih terdapat beberapa kendala baik dalam sistem aplikasi maupun jaringannya.

6. Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon | Rupiah | 400 M (PMA) | 1.733 M (PMA) | 433,25% |
| | | 600 M (PMDN) | 1.622 M (PMDN) | 270,33% |

Sumber: LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
2. Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal.

Program

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.



Secara garis besar kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Letak posisi kota Cirebon yang strategis ditambah infrastruktur yang sudah baik menambah poin penting peningkatan nilai investasi di Kota Cirebon.

7. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan | Poin | 90 | n/a | |

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan.

Arah kebijakan

- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Program

1. Program pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Program pelayanan pencatatan sipil.
3. Program sistem informasi administrasi kependudukan.
4. Program perencanaan kebijakan kependudukan.



8. Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang representatif.

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Jumlah bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik | % | 80 | 80 | 100% |

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan.

Arah kebijakan

- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Program

1. Program pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Program pelayanan pencatatan sipil.
3. Program sistem informasi administrasi kependudukan.
4. Program perencanaan kebijakan kependudukan.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Saat ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon tengah melakukan inovasi di bidang pelayanan administrasi kependudukan yang dinamakan “BROJOL BAE”, inovasi tersebut dilakukan agar seluruh penduduk Kota Cirebon khususnya yang baru lahir langsung mendapatkan akte kelahiran sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Inovasi tersebut dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan rumah sakit maupun klinik melahirkan yang ada di Kota Cirebon, dimana peran dari



rumah sakit maupun klinik tersebut melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila ada warga kota Cirebon yang melahirkan.

9. Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati 100% | Titik | 25 | n/a | |

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan Kabupaten Cirebon.

Arah kebijakan

- Menyelesaikan penegasan batas daerah antara kota Cirebon dengan kabupaten Cirebon.

Program

- Program pembinaan pemerintahan.

Masalah perbatasan antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon merupakan masalah klasik yang terus berlarut-larut, bahkan permasalahan tersebut harus diangkat dan dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Perkembangan infrastruktur, sarana perekonomian dan lainnya telah mengakibatkan adanya sedikit “kecemburuan” bagi masyarakat kabupaten untuk dapat turut menjadi warga kota Cirebon.

Penetapan batas daerah akhirnya terwujud dengan adanya peraturan menteri dalam negeri nomor 75 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten dan Kota Cirebon. Dengan adanya peraturan menteri dalam



negeri tersebut, maka pemerintah daerah kabupaten Cirebon dan kota Cirebon mengikuti peraturan tersebut sebagai penetapan batas di masing-masing wilayah tersebut.

10. Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Tersedianya peraturan tentang e-government 100% | % | 100 | 100% | 100% |

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

Arah kebijakan

- Mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan.

Program

- Program pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.

Perkembangan teknologi informatika telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dengan sistem pemerintahan. Saat ini perkembangan teknologi informasi diadopsi ke dalam sistem pemerintahan yang lebih dikenal dengan e-government (electronic government). Penyelenggaraan e-government dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan namun mengurangi jalur birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Kota Cirebon telah melakukan terobosan dengan program smart city, dalam program smart city diharapkan masyarakat semakin sadar dengan keberadaan teknologi informasi namun juga tetap memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan teknologi tersebut. Dalam program smart city, pemerintah daerah telah membuat aplikasi-aplikasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

misi ke-3: “Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum”.

Pencapaian misi ke-3 tersebut di atas, ditetapkan dengan sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus | Kasus | 0 | 0 | 100% |

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Penyediaan fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan.

Arah kebijakan

- Meningkatkan peran lembaga/SKPD/kecamatan/kelurahan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan.

Program

- Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Kota Cirebon adalah kota multi kultur dimana tingkat akulturasi budaya berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Selain itu posisi kota cirebon maupun perkembangan perekonomian di kota cirebon telah menarik



berbagai masyarakat yang datang dari berbagai latar belakang budaya dan agama untuk bersama-sama membangun kota Cirebon.

Dalam perkembangan yang multi kultur tersebut, gesekan horizontal yang bersifat suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di kota Cirebon tidak ada. Masing-masing pihak maupun masyarakat telah memahami dan memiliki tenggang rasa yang tinggi terhadap perbedaan tersebut, semua hal yang berkaitan dan mengarah kepada timbulnya benih-benih perpecahan mampu diredam oleh para tokoh yang ada di Kota Cirebon.

2. Terwujudnya masyarakat sadar hukum

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk | % | 15 | n/a | |

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Peningkatan peran serta dan kemitraan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Peningkatan intensitas kegiatan kepemudaan di lokasi rawan ketertiban umum.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan jumlah kader masyarakat sadar hukum.
2. Mengintensifkan kegiatan siskamling serta memberikan reward kepada masyarakat dalam kegiatan siskamling.
3. Mengintensifkan patroli dan cegah tangkal gangguan kantrantibmas.
4. Pembinaan kerohanian bagi pemuda di lokasi rawan ketertiban umum.
5. Penyaluran minat dan bakat terhadap pemuda di lokasi ketertiban umum.



Program

1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
4. Program pembinaan pemuda di daerah rawan ketertiban umum.
5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban pemerintah daerah kota Cirebon melalui satuan polisi pamong praja melakukan berbagai upaya diantaranya adalah:

1. Patroli 68, yaitu patroli yang dilaksanakan dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 setiap hari dengan jumlah personil sebanyak 5 orang.
2. Patroli siaga, yaitu patroli yang dilaksanakan setiap malam dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 24.00 yang dilaksanakan oleh 8 tim patroli dengan jumlah anggota sebanyak 69 orang.
3. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat pada 22 kelurahan.
4. Sosialisasi sistem perlindungan masyarakat tingkat kelurahan.
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional penertiban terpadu dan pekat untuk mengendalikan dan mengurangi penyakit masyarakat melalui operasi minuman beralkohol dan operasi PSK.

3. Terwujudnya RW K-3

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-----------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50% | % | 50 | n/a | |



Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Penilaian K-3 tingkat RW.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan peran lembaga kelurahan dalam bermitra dengan masyarakat.

Program

1. Program RW bersih.

4. Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan | Titik | 6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan | 6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan | 100% |

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka mengurai titik rawan kemacetan dan kecelakaan.
2. Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas.
3. Peningkatan keselamatan pelayaran.
4. Menata sistem parkir yang sudah ada serta menyediakan fasilitas parkir pada lokasi terpilih.



Arah kebijakan

1. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, serta rekayasa terhadap perlintasan sebidang.
2. Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan keselamatan pelayaran.
4. Penerapan/perubahan geometris sistem parkir, penerapan sistem perparkiran terpadu, parkir di luar badan jalan (off street) serta menyediakan taman parkir di pusat-pusat kegiatan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas gedung parkir.

Program

1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
3. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
4. Program peningkatan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran.
5. Program peningkatan pelayanan parkir.

Adapun target dalam menurunkan titik rawan kemacetan dan rawan kecelakaan yang diselenggarakan oleh dinas perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Jalan siliwangi
2. Jalan tentara pelajar
3. Jalan cipto mangunkusumo
4. Jalan pemuda
5. Jalan pekiringan

Dalam upaya mengurangi titik rawan kemacetan dan rawan kecelakaan telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Operasi penertiban gabungan dengan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya.
2. Memasang rambu pelican crossing di jalan siliwangi yang dapat menguranti tingkat kecelakaan terhadap pelajar.



3. Sosialisasi tentang pemahaman dan tata cara berlalu lintas di jalan raya.
4. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA.
5. Memasang lampu smart PJU dan lampu sorot (high mast)
6. Memasang marka ZOSS (zona selamat sekolah).
7. Pembinaan terhadap juru parkir di kota cirebon
8. Memasang marka jalan berupa marka tengah, marka tepi, zebra cross.
9. Menyelenggarakan bimbingan keselamatan lalu lintas terhadap satpam yang ada di sekolah-sekolah.

5. Tertatanya sektor informal

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya 40% | % | 40 | 45,86 | 114,65% |

Sumber: LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Identifikasi, pembinaan dan pendampingan usaha bagi PKL serta penyediaan ruang bagi PKL.

Arah kebijakan

1. Melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, serta pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta penyediaan ruang bagi PKL.



Program

- Program pembinaan pedagang kaki lima.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menata pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. Merelokasi pedagang kaki lima pada tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah kota cirebon sebanyak 50 pedagang kaki lima.
2. Memfasilitasi akses permodalan dan monitoring pedagang kaki lima yang berada di luar shelter yang menempati tempat sesuai aturan.

Perkembangan perekonomian Kota Cirebon boleh dikatakan lebih maju daripada wilayah sekitarnya sehingga menarik masyarakat untuk turut berusaha dalam sektor perekonomian di Kota Cirebon. Salah satu permasalahan yang ada dalam sektor perekonomian adalah munculnya pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat yang bukan seharusnya. Keberadaan pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan kondisi kota cirebon yang terlihat kurang teratur dan tertib, hal tersebut diakibatkan karena pedagang kaki lima berjualan tanpa memperhatikan kaidah maupun keindahan kota.

Dalam upaya menata pedagang kaki lima yang ada, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan menyediakan tempat kepada para pedagang untuk tetap berjualan tanpa harus melanggar aturan yang ada. Namun hal tersebut nampaknya kurang maksimal, karena masih saja para pedagang kembali berjualan ke tempat semula dengan dalih tempat yang baru kurang memiliki pelanggan atau bahkan di tempat yang baru kurang layak untuk berjualan. Namun demikian pemerintah daerah telah memberikan langkah solusi kepada para pedagang kaki lima untuk tetap dapat berjualan tanpa harus melanggar aturan yang ada.



6. Meningkatkan daya tanggap terhadap bencana

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana | Waktu | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | 100% |

Sumber: LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana

Arah kebijakan

1. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di lokasi rawan bencana.
2. Memberikan bimbingan teknis tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Program

1. program peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran.
 2. Program penanggulangan korban bencana.
 3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
- Keberadaan petugas pemadam kebakaran boleh dikatakan jarang diperhatikan, namun jika terjadi bencana kebakaran merekalah yang berada pada garis depan dalam memadamkan kobaran api. Pada tahun 2018 telah terjadi beberapa kali kebakaran di kota Cirebon, akibat dari kebakaran tersebut telah mengakibatkan kerugian material yang tidak



sedikit. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kebakaran maupun personil yang menangani masalah kebakaran sehingga diharapkan semakin cepat dan responsif dalam menerima pengaduan masalah kebakaran.

misi ke-4: “Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat”

Pencapaian misi ke-4 sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun | Tahun | 18 | 13,08 | 72,66% |
| Rata-rata lama sekolah (13 tahun) | Tahun | 13 | 9,88 | 76,76% |

Sumber: LKIP Dinas Pendidikan Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Pemberian kesempatan kepada usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya.
2. Peningkatan mutu tenaga pendidik.
3. Pengembangan pendidikan non formal dan informal

Arah kebijakan

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 12 tahun melalui BOP, penyediaan buku mata pelajaran dan LKS serta sarana prasarana pendidikan dan beasiswa bagi siswa berprestasi.



2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
3. Meningkatkan penyelenggaraan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah.
4. Mengembangkan kawasan percontohan pendidikan non formal dan informal di tingkat RW.
5. Mengembangkan kawasan percontohan perpustakaan ke tingkat RW dan kelurahan.

Program

1. Program manajemen pelayanan pendidikan.
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Program pendidikan menengah.
4. Program pendidikan non formal.
5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Program pendidikan anak usia dini.
7. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui dinas pendidikan telah melakukan berbagai upaya menuju masyarakat kota Cirebon yang mengenyam pendidikan dasar. Berdasarkan hasil data tersebut di atas, rata-rata masyarakat kota Cirebon sudah mengenyam pendidikan hingga lulus SMP. Dan harapan lama sekolah masyarakat Kota Cirebon hingga lulus SMA.

Kualitas pendidikan baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas layanan sudah semakin baik, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya murid dari luar daerah yang ingin bersekolah di Kota Cirebon.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| BOR | % | 80,6 | 57,09 | 70,83% |
| LOS | Hari | 4,48 | 4,20 | 93,75% |
| TOI | Hari | 1,27 | 3,11 | 57% |
| BTO | Kali | 43,35 | 12,68 | 169,94% |
| NDR (kematian 48 jam/1000) | ‰ | 22,56 | 43,04 | 190,78% |
| GDR (kematian kasar/1000) | ‰ | 44,28 | 75 | 169,37% |
| Survei kepuasan pasien/pelanggan | % | 85 | 81,43 | 95,8% |
| KK ber-PHBS | % | 75 | 75,22 | 100,29% |
| Angka kematian ibu | Orang | 3 | 3 | 100% |
| Angka kematian bayi | Bayi | 50 | 17 | 166% |
| Gizi buruk | % | <1 | 0,17 | 100% |
| Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin | % | 100 | 100 | 100% |
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan | % | 77,5 | 100 | 129,03% |

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.



3. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.

Arah kebijakan

1. Mengembangkan kawasan percontohan perilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan (rukun warga, sekolah, perkantoran, tempat-tempat umum).
2. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
3. Menyediakan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga kota Cirebon.
4. Menyediakan biaya operasional pelayanan kesehatan rujukan.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan lanjutan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan khusus kelas III.

Program

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Program upaya kesehatan masyarakat.
3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
4. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
5. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
6. Program pelayanan kesehatan lanjutan.
7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Adapun pencapaian kinerja untuk beberapa kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja terkait BOR, LOS, TOI, NDR GDR merupakan target kinerja yang dipergunakan untuk rumah sakit daerah Kota Cirebon, secara umum capaian BOR dan LOS termasuk kategori baik sedangkan TOI kurang baik karena tidak mencapai target efektif karena ada perpanjangan interval, BTO termasuk kurang baik juga karena realisasi BTO sebesar 58,79 masih berada di luar standar hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kunjungan rawat inap sehingga frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun tinggi. GDR termasuk kategori kurang baik dan NDR masuk dalam kategori kurang



baik juga karena standar angka normal kementerian kesehatan yaitu NDR 25‰ penyebabnya karena banyaknya pasien-pasien yang dirawat di RSD gunung jati merupakan rujukan dari RS lain yang sudah dalam keadaan sulit.

2. Pencapaian indeks kepuasan masyarakat khususnya terhadap pelayanan dasar kesehatan pada umumnya baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:
 - a) Keterbatasan SDM spesialis terutama spesialis radiologi yang jumlah seharusnya ada 5 orang, tetapi RSD hanya memiliki 2 orang dokter spesialis tetap ditambah 2 orang dari rumah sakit luar yang diperbantukan di RSD gunung jati, sehingga *respon time* menjadi sangat lama
 - b) Sarana dan prasarana fisik rumah sakit yang di beberapa bagian masih dalam pembangunan fisik yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan terutama ruangan yang menjadi terlihat kotor. Fasilitas umum seperti toilet di rawat jalan, ruang tunggu intensif terbatas dan kurang terawat.
 - c) Perubahan regulasi dari BPJS yang tidak konsisten sehingga berdampak terhadap sistem pelayanan di rumah sakit.
3. Angka kematian ibu (AKI) menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas, penanganan komplikasi pra rujukan dan rujukan. di kota cirebon pada tahun 2018 ada 3 per 5679 kelahiran hidup.
4. Angka kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun (bayi lahir dalam keadaan hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. Faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian bayi antara lain adalah tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, penanganan komplikasi kegawatdaruratan pra rujukan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

dan rujukan, tingkat keberhasilan program KIA, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Pada tahun 2018 adalah 23 per 5651 lahir hidup jika dihitung per 1000 lahir hidup adalah 4 per 1000 lahir hidup. Penyebab kematian bayi pada tahun 2018 adalah BBLR, asfiksia, pneumonia, hypotemi dan sepsis.

5. Angka kasus gizi buruk tahun 2018 sebesar 0,17% (37 kasus dari 22.357 balita) sesuai target kemenkes di bawah 1%.

3. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 daru jumlah PUS | % | 75 | 63,11 | 84,11% |

Sumber: LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pengendalian kelahiran.

Arah kebijakan

- Mengendalikan kelahiran dan pendewasaan perkawinan.

Program

- Program keluarga berencana.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Cirebon melalui dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam upaya meningkatkan peserta KB aktif adalah:

1. Promosi peningkatan usia perkawinan melalui program genre.
2. Peningkatan pelayanan KB berkualitas melalui pelayanan KB melalui jaminan kesehatan nasional.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

3. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.
4. Advokasi tentang pembangunan berwawasan kependudukan bagi pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.
5. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan.
6. Peningkatan partisipasi penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS).
7. Peningkatan pengetahuan tentang program KB khususnya kesehatan reproduksi bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama bagi PUS remaja.

4. Terwujudnya prestasi olahraga di tingkat provinsi

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018 | Posisi | 10 besar tingkat provinsi | 10 besar tingkat provinsi | 100% |

Sumber: LKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Pembinaan atlet berprestasi
2. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga.

Arah kebijakan

1. Melakukan pembinaan atlet berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan.
2. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga.

Program

1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Pada kegiatan pekan olah raga daerah (PORDA) tahun 2018, Kota Cirebon meraih peringkat 10 dengan total perolehan medali sebanyak 101 medali dengan komposisi 20 medali emas, 34 medali perak dan 47 medali perunggu.

5. Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 | % | 50 | 40,15 | 80,3% |
| Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 cagar bangunan di tahun 2012) | unit | 80 | 73 | 91,25% |

Sumber: LKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Penetapan kalender budaya.
2. Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya.

Arah kebijakan

1. Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event pagelaran budaya khas Cirebon dan menjadikan kota Cirebon sebagai pusat event budaya khas Cirebon se wilayah Cirebon dengan meningkatkan dukungan dan keterlibatan keraton



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

- Melakukan penataan/revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya dan kerjasama dengan pemilik budaya dalam upaya pelestarian.

Program

- Program pengelolaan keragaman budaya.
- Program pengelolaan kekayaan budaya.

6. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Indeks daya beli | Indeks | 65 | n/a | |
| Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 | Orang | 444.959 | 1.808.544 | 406,45% |

Sumber: LKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tribina (manusia, usaha dan lingkungan).
- Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja.
- Peningkatan keterampilan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
- Peningkatan sistem distribusi, stabilisasi dan cadangan pangan.
- Peningkatan promosi wisata.



Arah kebijakan

1. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan UMKM.
2. Meningkatkan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan.
3. Meningkatkan kompetensi BLK.
4. Melaksanakan pelatihan keterampilan yang berorientasi pada penempatan langsung.
5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
6. Meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan.
7. Mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
9. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergi dan partisipatif. meningkatkan promosi wisata budaya khas Cirebon melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Program

1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
4. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
5. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
6. Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
7. Program pelayanan penempatan tenaga kerja.
8. Program peningkatan ketahanan pangan.
9. Program pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.



10. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan.
11. Program rehabilitasi hutan dan lahan.
12. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
13. Program peningkatan produksi peternakan.
14. Program peningkatan produksi perikanan tangkap.
15. Program peningkatan produksi perikanan budidaya.
16. Program pengembangan destinasi pariwisata.

Letak wilayah Kota Cirebon yang merupakan jalur penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah telah mengakibatkan wilayah Kota Cirebon turut berkembang dengan baik. Sarana transportasi yang semakin memudahkan pergerakan manusia juga turut andil menambah peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Cirebon. Saat ini sektor pariwisata di Kota Cirebon sudah berbenah diri dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Wisata kuliner maupun wisata belanja merupakan salah satu unggulan di Kota Cirebon, makanan khas Cirebonan maupun batik khas Cirebonan adalah salah satu diantaranya yang membuat para wisatawan maupun pengunjung datang ke Kota Cirebon. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin ramainya sentra kuliner maupun sentra belanja pada saat weekend, para pengunjung dan wisatawan datang untuk menikmati suasana maupun makanan Kota Cirebon.

Selain itu juga wilayah di sekitar Kota Cirebon, seperti Kabupaten Kuningan juga memiliki tempat-tempat pemandangan yang menarik dan terus dikembangkan sehingga mampu menjadi magnet bagi para wisatawan untuk berkunjung.



7. Menurunnya jumlah KK miskin

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|--------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Rasio KK miskin dibandingkan KK kota | % | 25 | n/a | |

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Peningkatan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin.
3. Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Arah kebijakan

1. Menyediakan satu data keluarga miskin.
2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.
3. Menyediakan akses pelayanan pendidikan berupa beasiswa rawan DO.
4. Memberikan akses pendampingan pelayanan kesehatan rujukan.
5. Menyediakan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin.
6. Menyediakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah.
7. Menyediakan akses pelayanan pangan dan gizi.
8. Memberikan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis mesjid dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin.

Program

1. Program satu data keluarga miskin.
2. Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

3. Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin.
4. Program peningkatan akses pelayanan kesehatan, rujukan bagi keluarga miskin.
5. Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi dan listrik bagi keluarga miskin.
6. Program pelayanan akses pangan dan gizi bagi keluarga miskin.
7. Program pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis mesjid untuk keluarga miskin.

8. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Menurunnya kasus | Kasus | 53 | 65 kasus | 122,64% |

Sumber: LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Arah kebijakan

1. Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
2. Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan rukun warga layak anak.

Program

1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
2. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Dalam rangka mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya kekerasan terhadap anak, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah membentuk forum WADUL BAE, dalam forum tersebut disosialisasikan kepada masyarakat tentang kekerasan dan juga meminta kesadaran masyarakat untuk turut pro aktif jika melihat ada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya kekerasan terhadap anak. Selain itu anak-anak yang mengalami kekerasan dan yang sejenisnya akan ditampung dan diberikan konseling sehingga mampu mengurangi trauma anak akibat tindakan kekerasan. Penampungan tersebut dilakukan melalui rumah singgah, di dalam rumah singgah itu anak-anak diberikan bimbingan dan konseling dari pakar psikolog maupun pakar lainnya.

9. Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-------------------------------------------|--------|------------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Jumlah penanganan PMKS 5% pada tahun 2018 | % | 5% (3.685 orang) | n/a | |

Sumber: LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Penanganan PMKS.

Arah kebijakan

- Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial.

Program

1. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.



2. Program penguatan jejaring kemitraan dalam rangka penanganan PMKS.
3. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

10. Terpenuhinya kesetaraan gender

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Rasio gender di atas 30% perempuan | % | 40 | n/a | |

Sumber: LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Penyajian data terpilah.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan peran dan keterwakilan gender di setiap kegiatan pembangunan.

Program

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.



Misike-5: “Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan”

Pencapaian misi ke-5 sebagaimana tersebut di atas dapat diukur dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif) | % | 5 | n/a | |

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan kualitas hasil musrenbang kecamatan.

Arah kebijakan

- Membentuk fasilitator musrenbang untuk tiap kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian hasil musrenbang.

Program

- Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Cirebon saat ini sudah mulai tumbuh dengan baik, proses perencanaan dari tingkat RT maupun RW kemudian sampai ke tingkat kota selalu melibatkan partisipasi masyarakat.



Pelibatan peran serta masyarakat disebabkan karena penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nantinya akan dinikmati oleh masyarakat, oleh karena itu masyarakatlah yang paling mengetahui pembangunan apa yang paling mereka butuhkan. Pemerintah daerah kota Cirebon telah menganggarkan program-program pembangunan untuk dapat dilaksanakan melalui kecamatan dan kelurahan.

Program pembangunan tersebut dilakukan juga dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaannya dalam bentuk swakelola.

2. Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Persentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW | % | 10 | 10 | 100% |

Sumber: LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Memberikan reward terhadap partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan

- Melaksanakan kompetisi partisipasi masyarakat khususnya bantuan RW.

Program

- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.



Misi ke-6: “Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup”

Pencapaian misi ke-6 sebagaimana tersebut di atas diukur dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal pemakaman.

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|--------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Meningkatnya luas ruang terbuka hijau menuju 12% | % | 9,81 | 1,9% | 77,33% |

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan ruang terbuka hijau publik.

Arah kebijakan

- Menambah RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik pemerintah, optimalisasi area sempadan jalan, sungai dan laut serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dan penguatan kelembagaan yang menangani aset fasos/fasum dalam rangka peningkatan RTH.

Program

1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau.
2. Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum.



2. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome) | % | 90 | 89,7 | 77,33% |
| Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan % (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%) | % | 78 | 77,5 | 99,35% |
| Air sungai (lokasi) meningkatnya pelayanan konservasi SDA (rata-rata outcome) | % | 80 | 79,6 | 79,6% |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome) | % | 80 | 69,6 | 87% |

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Penyediaan data dan informasi serta instrumen SDA dan LH secara berkesinambungan.
2. Penerapan instrumen pengendalian dan pengawasan pencemaran, perusakan lingkungan.
3. Pengendalian pelaksanaan konservasi SDA.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.



Arah kebijakan

1. Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penyediaan informasi SDA dan lingkungan hidup, konservasi dan pelestarian fungsi atmosfer, penanganan tanah timbul dan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan laut.
2. Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna, uji emisi dan kadar polusi.
3. Mengendalikan perusakan dan konservasi SDA melalui pemantauan pemanfaatan SDA dan perubahan iklim.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH melalui bank sampah, green office, sekolah berbudaya lingkungan dan adipura.

Program

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Program perlindungan dan konservasi SDA.

Isu-isu mengenai lingkungan hidup mendapat perhatian penting dari seluruh masyarakat karena lingkungan merupakan tempat bagi setiap unsur manusia, hewan dan tumbuhan melangsungkan kehidupannya. Berkaitan dengan isu lingkungan hidup, pemerintah daerah kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya agar kualitas daya dukung lingkungan semakin baik. Dalam upaya tersebut, pemerintah daerah kota Cirebon telah melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan yang ada dengan melakukan pengambilan sampel di berbagai titik sampel, baik itu di sungai, laut maupun udara dan kebisingan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota Cirebon, Pemerintah Daerah melakukan upaya meminimalisir dampak lingkungan dengan mewajibkan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL) sesuai dengan kriteria kegiatannya, dengan dokumen tersebut setiap



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

pelaku usaha diwajibkan untuk berkomitmen mengelola dan memantau dampak yang diakibatkan dari usaha/kegiatannya terhadap lingkungan hidup sekitarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 diketahui bahwa:

1. Kualitas udara (parameter CO, SO₂, NO₂, O₃, HC, TSP, Pb di wilayah kota Cirebon masih berada pada ambang batas normal yang diperbolehkan.
2. Kualitas air sungai berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai secara keseluruhan yang mewakili 7 sub daerah aliran sungai yang ada di kota Cirebon telah tercemar sedang karena terdapat parameter dominan yang melebihi ambang batas yaitu dissolved solid (TDS), biochemical oxygen demand, ammonia (NH₃), Nitrite (NO₃), Chloride (CL) manganese (Mn) dan SURfactant, MBAS.
3. Kualitas air laut berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa air laut di 3 titik telah tercemar ringan berdasarkan parameter yang berlebih atau setidaknya sama yaitu kecerahan dan amonia.

3. Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80% | % | 80 | 80 | 100% |
| Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 100% | % | 100 | n/a | n/a |

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2018



Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat (3R, RW zero waste) dan penyediaan sarana dan prasarana, kerjasama pelayanan persampahan serta penggalangan CSR, meningkatkan TPA kopi luhur menjadi sanitary landfill, meningkatkan koordinasi regional dalam rangka TPA regional.

Program

- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Pengelolaan sampah merupakan masalah klasik yang hampir sering ditemui diberbagai tempat. Penanganan sampah yang saat ini lebih menitik beratkan kepada memindahkan sampah dari lingkungan rumah tangga ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA), belum melakukan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi potensi sampah dari sumbernya.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengelola sampah, mulai dari penyediaan angkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) hingga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membentuk bank sampah. Kaitannya dengan bank sampah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bahkan melakukan kerja sama dengan pegadaian kota cirebon dimana masyarakat bisa membeli emas dengan sampah melalui bank sampah. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam upaya mengurangi sumber sampah dan memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna.



4. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|----------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% | % | 100 | 87 | 87% |
| Proporsi jumlah jembatan kondisibaik | % | 100 | 100 | 100% |

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan.

Arah kebijakan

- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan.

Program

- Program pembangunan jalan dan jembatan.

Keberadaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama bagi kemajuan suatu daerah, hal tersebut juga dipahami oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggaraan pembangunan di Kota Cirebon tidak hanya pembangunan kepada aspek manusianya saja, akan tetapi secara komprehensif membangun infrastrukturnya agar proses pembangunan lainnya dapat berjalan dengan baik.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan dan kelengkapannya serta jembatan.

5. Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim.

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik | Titik | 10 | 8 | 80% |

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Pengembangan sarana dan prasarana drainase.
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase.
3. Konservasi sumber daya air.

Arah kebijakan

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder.
2. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder.
3. Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah.

Program

1. Program pembangunan saluran drainase primer dan sekunder.
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase primer dan sekunder.



3. Program pengembangan pengelolaan air konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
4. Program pengendalian banjir

Banjir merupakan salah satu masalah yang semakin menghantui daerah perkotaan, tingkat curah hujan yang tinggi ditambah dengan daya dukung resapan tanah yang berkurang akibat berubahnya alih fungsi tanah yang semula merupakan daerah resapan menjadi daerah perumahan menjadi salah satu penyebabnya.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi titik rawan genangan maupun banjir salah satu diantaranya adalah dengan melakukan normalisasi fungsi saluran air. Saluran air yang baik diharapkan akan mengalirkan air menuju sungai yang nantinya bermuara ke laut. Secara rutin Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengerukan drainase dan saluran air agar fungsi saluran dapat berjalan dengan normal.

6. Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal.

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Cakupan pelayanan air limbah domestik | % | 100 | 100 | 100% |
| Jumlah jamban dan septiktank 76,45% (65.766 rumah tangga) | % | 76,45 | 90,32% | 118,14% |

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:



Strategi

- Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat.

Arah kebijakan

- Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengelolaan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL (sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat.

Program

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah.

Masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki jamban sehat sebanyak 30.780 penduduk, dan sampai dengan akhir tahun 2018 baru ada 1 kelurahan yang stop buang air besar sembarangan (SBS) yaitu kelurahan larangan.

Pemerintah daerah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan upaya dalam hal pembangunan pengelolaan air limbah yang berbasis masyarakat (IPAL Sanimas) di 6 lokasi untuk memenuhi sambungan rumah/kepala keluarga sejumlah 300 sambungan rumah atau sama dengan 1500 jiwa.

7. Tersedianya sistem pengelolaan air minum

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|---------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Tingkat pelayanan air minum perpipaan | % | 80 | 75,89 | 94,86% |

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2018



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pengembangan dan peningkatan sistem air minum non perpipaan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan.

Arah kebijakan

- Mengembangkan sistem penyediaan air minum non perpipaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas air baku.

Program

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melaksanakan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) perpipaan yang diselenggarakan melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai dengan tahun 2018, masyarakat Kota Cirebon yang sudah menikmati air minum tersebut berjumlah 241.395 penduduk (75,89%). Saat ini sumber air PDAM berasal dari mata air yang ada di Kabupaten Kuningan.

8. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus | Kasus | 0 | 0 | 100% |

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:



Strategi

- Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.

Arah kebijakan

1. Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang di wilayah selatan.
2. Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat-tempat lain yang mudah diketahui.

Program

1. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Program penyediaan sistem informasi pengendalian tata ruang.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan upaya dalam rangka pengendalian tata ruang, berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Dari 34 kasus yang terjadi pada bangunan rumah tangga dan ruko yang membangun tanpa dilengkapi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk itu pengawas melakukan pengawasan di lapangan dan ditemukan terdapat bangunan yang sedang membangun setelah ditanyakan belum memiliki surat izin membangun bangunan, sehingga pengawas melakukan pendataan dan dilakukan teguran agar segera mengurus IMB.
2. 1 kasus pedagang kaki lima jalan perjuangan yang melanggar ketentuan sehingga pengawas lapangan/tata ruang mendata dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang rata-rata kasus yang terjadi hanya pada proses administrasi yang belum ditempuh oleh para pelaku.



9. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20% | % | 20 | 2,14 | 10,7% |

Sumber: LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Penataan lingkungan kawasan permukiman kota.

Arah kebijakan

- Menata lingkungan permukiman dan meningkatkan penyediaan fasilitas umum dan jalan alternatif ke kawasan pengembangan perumahan.

Program

- Program lingkungan sehat perumahan.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.387-BAPPEDA/2015 luasan kawasan permukiman kumuh Kota Cirebon adalah 122,6 Ha. Pada tahun 2018 terjadi perubahan data lokasi penetapan kumuh berdasarkan keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.133-DPRKP/2018 luas kawasan permukiman kumuh adalah 315,91 Ha dikurangi pengurangan kawasan kumuh sampai tahun 2016 dan 2017 dengan luas 27,47 Ha sehingga luas permukiman kumuh pada tahun 2018 adalah 343,4 Ha, berkurang 13,55 Ha atau 2,14 % dari total luas wilayah Kota Cirebon.



10. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | Rumah | 16.256 | 864 | 5.31% |

Sumber: LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pengembangan rumah sehat sederhana.

Arah kebijakan

- Menyediakan rumah sehat sederhana yang layak huni dan superblok rumah susun sewa dan milik yang murah (untuk mendekatkan tempat tinggal dengan tempat kerja) pada lokasi pasar, sarana kesehatan dan lainnya.

Program

- Program pengembangan perumahan.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 864 rumah.

11. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang.

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2018 | | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN |
|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum | % | 90 | 100 | 110% |

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018



Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan.

Arah kebijakan

1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan umum massal, meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan angkutan hari-hari besar.
2. Meningkatkan kualitas dan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, pejalan kaki, penyandang disabilitas dan pemakai sepeda.

Program

1. Program peningkatan pelayanan angkutan.
2. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Keberadaan transportasi umum merupakan salah satu prasyarat bagi kemajuan suatu daerah, tanpa adanya transportasi umum perkembangan perekonomian dan aspek lainnya akan berjalan kurang maksimal. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui dinas perhubungan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan cakupan layanan transportasi umum di Kota Cirebon.

Hingga tahun 2018, cakupan wilayah transportasi umum di Kota Cirebon sudah mencapai 100%, hampir seluruh pelosok wilayah bahkan wilayah yang menjadi perbatasan Kota Cirebon sudah ada transportasi umum. Keberadaan pengusaha online dalam transportasi umum turut menambah andil pencapaian cakupan wilayah transportasi umum.



Analisis Pencapaian Sasaran, Hambatan dan permasalahan yang dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

a. Analisis Pencapaian Sasaran

Beberapa hasil Pembangunan yang telah dicapai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya laju inflasi dari 4,36% pada tahun 2017 menjadi 2,80% pada tahun 2018. Penurunan ini dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat 3,54% dan rata-rata Nasional 3,13%.
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 9,29% pada tahun 2017 menjadi 9,06% pada tahun 2018. Penurunan ini masih berada di atas rata-rata Jawa Barat 8,22% dan rata-rata Nasional 5,5%.
3. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dari 66,45% tahun 2017 naik menjadi 68,03% pada tahun 2018. Peningkatan ini berada di atas rata-rata Jawa Barat 63,82%, namun masih dibawah rata-rata Nasional 69,20%
4. Meningkatnya angka harapan hidup dari 71,83 tahun pada tahun 2016, menjadi 71,89 tahun pada tahun 2017.
5. Menurunnya kasus gizi buruk dari 43 kasus pada tahun 2017 menjadi 37 kasus pada tahun 2018.
6. Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan dari 4 kasus pada tahun 2017 menjadi 3 kasus pada tahun 2018.
7. Menurunnya ibu hamil kurang energi kronis dari 14,4% pada tahun 2017 menjadi 13,8% pada tahun 2018.
8. Menurunnya balita stunting dari 13,42% pada tahun 2017 menjadi 10,1% pada tahun 2018.
9. Meningkatnya harapan lama sekolah dari 12,58 tahun pada tahun 2013, menjadi 13,15 tahun pada tahun 2017.
10. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 9,33 tahun pada tahun 2013, menjadi 9,96 tahun pada tahun 2017.
11. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat dari 71,81 pada tahun 2013, menjadi 72,81 pada tahun 2017.



12. Terbentuk dan terbinanya 76 koperasi dan pra koperasi berbasis RW atau lembaga ekonomi mikro berbasis RW, sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga.
13. Diraihnya penghargaan Top 10 pengelola pengaduan pelayanan publik tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
14. Diraihnya penghargaan *Top Information Technology On Information Technology Collaboration and inovation Development* dan *Top Leader On Information Technology Leadership* Tahun 2018.
15. Penghargaan Natamukti dari *Internasional Council For Small Business Indonesia City Award* Tahun 2018.
16. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018.
17. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan nilai "B" (Baik) pada tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada Tahun 2018 ada beberapa penghargaan yaitu :

1. Sembilan (9) penghargaan tingkat Nasional
2. Dua puluh Lima (25) penghargaan tingkat Provinsi

b. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon Tahun 2018 secara umum dapat dikategorikan baik, namun terdapat beberapa indikator sasaran yang belum dapat dicapai dengan baik, yaitu:

- a. Pencapaian indikator "Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%" tidak tercapai dengan baik, selama pencapaian 5 tahun bisa dikatakan bahwa indikator tersebut tidak dapat tercapai dengan baik, jika menelaah bahwa urusan keagamaan bukan merupakan salah satu urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi bidang keagamaan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Peningkatan kualitas religius aparatur diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan dokumen RPJMD, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk hal tersebut, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, jika melihat indikator, badan kepegawaian hanya disuruh mendata dan memonitoring pelaksanaan kegiatan keagamaan, dan hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan tersebut jika dilihat dengan penggunaan anggaran sesuai dengan program RPJMD telah menghabiskan anggaran yang cukup besar (Rp 416,440,000), namun realisasi yang dihasilkan tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, maka untuk itu perlu dilakukan evaluasi pencapaian sasaran maupun evaluasi penggunaan anggaran agar dapat berhasil dengan baik.

- b. Terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak ada data capaian realisasinya, salah satu faktor penyebabnya adalah:
 - 1) perangkat daerah yang mengampu tanggung jawab tersebut tidak mencantumkan target RPJMD ke dalam renstra perangkat daerahnya sehingga ketika melaporkan capaian kinerja melalui LKIP tidak mencantumkan data realisasi.
 - 2) Terdapat indikator sasaran yang tidak bisa dihitung oleh perangkat daerah karena hal tersebut memerlukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di kota cirebon.
- c. Masih adanya perangkat daerah yang terlambat mengirimkan LKIP perangkat daerahnya sehingga tim penyusun LKIP Kota mengalami kesulitan perhitungan pencapaian sasaran.

Tabel 3. 3Perbandingan Pencapaian Target Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Misi Ke-1: Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat kota Cirebon yang religius | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan | Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100% | 100% | 45% | 100% | 14% | 75% | 28% | 75% | 20% | 75% | 0% |
| 1.2.1 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan | Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan | 90% | n/a | 90% | 49% | 85% | 58,33% | 80% | 90% | 75% | 89,86% |
| 1.2.2 | Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan | Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi | 6 besar tingkat Provinsi | n/a | Peringkat 7 tingkat provinsi | Peringkat 14 tingkat provinsi | Peringkat 7 tingkat provinsi | Peringkat 19 | Peringkat 7 tingkat provinsi | 10 | Peringkat 9 tingkat provinsi | 9 besar |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Target | Realisasi |
| | | | | | | nsi | nsi | | nsi | | | |
| 1.2.3 | Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing | Tidak ada kasus konflik yang bernuansa agama | 0% | 0% | 0 kasus |
| Misi ke-2: Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional | Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan | 100% | 72% | 100% | 100% | 75% | 74% | 75% | 99% | 75% | 63% |
| | | Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun | 3 kasus / 1000 PNS | 4 kasus / 1000 PNS | 3 kasus / 1000 PNS | 3 kasus / 1000 PNS | 4 kasus / 1000 PNS | 4 kasus / 1000 PNS | 5 kasus / 1000 PNS | 4 kasus / 1000 PNS | 6 kasus / 1000 PNS | 6 kasus / 1000 PNS |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | | Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100% | Dihapus | dihapus | Dihapus | dihapus | Dihapus | dihapus | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2 | Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD | Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| | | Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100% | 100% | 98,90% | 100% | 96,19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.3 | Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah | Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan | 14/70 | n/a | 14 / 70 | 24 / 70 | 14/70 | 42/70 | 14/70 | 9/70 | 14/70 | 16/70 |
| | | Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip | 1060 arsip digital | n/a | 110 berkas | 128 berkas | 110 berkas | 114 berkas | 100 berkas | 136 berkas | 100 berkas | 99 berkas |
| 2.1.4 | Terwujudnya pelayanan prima | Indeks kepuasan masyarakat dalam | 90 poin | 78,87 | 87 poin | 73,97 | 85 | 71,4 | 80 | 74,51 | 75 | 77,79 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | dalam perijinan | pelayanan perijinan 95% | | poin | | poin | poin | poin | poin | poin | poin | poin |
| | | Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon | 400 M (PMA) 600 M(PMDN) | 1.733 M (PMA) 1.620 M (PMDN) | PMA 360 M PMDN 555 M | PMD N (1,757 T) | PMA (325 M) PMD N (510 M) | PMD N (1.357.254.219) | PMA (280 M) PMD N (475 M) | PMA (na) PMD N (1.321.065.350) | PMA (250 M) PMDN (425 M) | PMA (250 M) PMDN (425 M) |
| 2.1.5 | Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan | 90 poin | n/a | 85 poin | 80,62 poin | 85 poin | 71,4 poin | 80 poin | 79,83 poin | 80 poin | 79,8 poin |
| | Terwujudnya sarana dan prasaran organisasi perangkat daerah yang representatif | Jumlah bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik | 80% | 80% | 79% | 79% | 78% | 100% | Baru | Baru | Baru | baru |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2.2.1 | Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD | jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018. | Dihapus | Dihapus | Dihapus | dihapus | Dihapus | Dihapus | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2.3.1 | Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebesar 95% | 80 poin | 80 poin | 79 poin | | 78 poin | n/a | 80 poin | na | 80 poin | 80 poin |
| 2.3.2 | Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon | Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100% | 25 titik | n/a | 7 titik | 0 titik | 0 titik | 0 titik | 0 titik | 0 titik | 0 titik | 0 titik |
| 2.4.1 | Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota | Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100% | 100% (1 peraturan e-government) | 100% (4 peraturan e-government) | 96% (1 peraturan e-government) | 4 peraturan | 92% (1 peraturan e-gove | n/a | 88% (1 peraturan e-gove | 0 | 84% (1 peraturan e-government) | 84% (1 peraturan e-government) |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi | | | | | | | | | | | |
| | | Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100% | 50 sistem yang terbangun | 22 sistem yang terbangun | 46 sistem yang terbangun | 18 sistem yang terbangun | 42 sistem yang terbangun | 28 sistem yang terbangun | 38 sistem yang terbangun | 38 sistem yang terbangun | 34 sistem yang terbangun | n/a |
| Misi ke-3: Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an | Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus |
| 3.2.1 | Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum | Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk | 15% | n/a | 18% | n/a | 20% | n/a | 22% | Na | 24% | n/a |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | | Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik | 10 titik | 20 titik | 20 titik | 25 titik | 30 titik | n/a | 40 titik | Na | 45 titik | 35 titik |
| 3.3.1 | Menurunnya tingkat pelanggaran perda | Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang ditegakkan | | | | | dihapus | dihapus | 9 kasus | 17 kasus | 10 kasus | 9 kasus |
| 3.4.1 | Terwujudnya RW K-3 | Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50% | 50% | 50% | 40% | | 30% | n/a | 20% | Na | 10% | 10% |
| 3.5.1 | Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan | Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan | 6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan | 6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan | 7 titik rawan kemacetan dan 3 titik rawan kecelakaan | 7 titik rawan kemacetan dan 3 titik rawan kecelakaan | 8 titik rawan kemacetan dan 3 titik rawan kecelakaan | 8 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan | 9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan | 8 titik | 10 titik rawan kemacetan dan 5 titik rawan kecelakaan | 10 titik rawan kemacetan dan 5 titik rawan kecelakaan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi |
| | | | | | | n | n | n | akaa n kece laka an | | | |
| 3.6.1 | Tertatanya sektor informal | Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya | 40% | 45,86% | 46% | 48,37 | 52% | 33,91% | 50% | 70% | 60% | 50% |
| 3.7.1 | Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana | Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | | | | | | darurat bencana 7 hari | tanggap darurat bencana 7 hari | tanggap darurat bencana 7 hari | tanggap darurat bencana 7 hari | | na 7 hari | |
| Misi ke-4: Meningkatkan kualitas sumber daya kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan | Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun | 18 tahun | 13,08 tahun | 17 tahun | 13,07 tahun | 16 tahun | Data BPS | 13 tahun di tahun 2011 | 12,94 | 13 tahun di tahun 2011 | 12,93 |
| | | Rata-rata lama sekolah (13 tahun) | 13 tahun | 9,88 | 12,5 tahun | 9,87 tahun | 12 tahun | Data BPS | 11,5 tahun 2011 | 9,76 | 11 tahun 2011 | 9,55 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 4.2.1 | Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat | Angka harapan hidup 71,1 | Dihapus | dihapus | Dihapus | dihapus | Dihapus | dihapus | 70,13 tahun 2011 | 71,79 tahun | 69,8 tahun 2011 | 71,77 tahun |
| | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | BOR (%) | 80,6 | 57,09 | 79,81% | 86,76 % | 81,44 | 70,66 | Baru | Baru | Baru | baru |
| | | LOS (hari) | 4,48 | 4,20 | 4,39 hari | 4,39 hari | 4,35 | 4,42 | Baru | Baru | Baru | baru |
| | | TOI (hari) | 1,27 | 3,11 | 1,2 hari | 2,19 hari | 1,16 | 1,82 | Baru | Baru | Baru | baru |
| | | BTO (hari) | 43,35 | 12,68 | 41,29 kali | 13,18 kali | 39,32 | 58,89 | Baru | Baru | Baru | baru |
| | | NDR (kematian 48 jam/1000) | 22,56 ‰ | 43,04 | 22,56‰ | 51,00 ‰ | 23,75 ‰ | 52 | Baru | Baru | Baru | baru |
| | | GDR (kematian kasar/1000) | 44,28 ‰ | 75 | 54,67‰ | 70,00 ‰ | 54,67 ‰ | 70 | Baru | Baru | Baru | baru |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi |
| | | Survei kepuasan pasien/pelanggan | 85% | 81,43 | 85% | 81,43 % | 80% | - | Baru | Baru | Baru | baru |
| | | KK ber-PHBS (%) | 75% | 75,22 | 70% | 66,80 % | 65% | 64,97% | Baru | Baru | Baru | baru |
| | | Angka kematian ibu | 3 orang | 3 | 3 orang | 4 orang | 3 orang | 1 orang | Baru | Baru | Baru | baru |
| | | Gizi buruk | <1% | 0,17 | <1% | 0,18 | <1% | 0,18 | Baru | Baru | Baru | baru |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Baru | Baru | Baru | baru |
| | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (%) | 77,50% | 100 | 77 | 81,43 | 76,5 | 79,22 | Baru | Baru | Baru | baru |
| 4.2.2 | Terkendalinya laju pertumbuhan | Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun | 75% | 63,11 | 72% | 103,10 | 69% | 81,60 | 66% | 81,45% | 63% | 89% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | penduduk | 2018 dari jumlah PUS. | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Terwujudnya prestasi olahraga di tingkat provinsi | Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018 | 10 besar tingkat provinsi | 10 besar tingkat provinsi | | | | | 11 besar tingkat provinsi | 10 besar tingkat provinsi | 11 besar tingkat provinsi | 10 besar tingkat provinsi |
| 4.4.1 | Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan | Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 | 50% | 40,15% | 45% | 40,15% | 40% | 40% | 35% | 33,09% | 30% | 31,03% |
| | | Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012) | 80% | 73% | 78 jenis | 73 jenis | 76 jenis | 76 jenis | 74 jenis | 74 jenis | 72 jenis | 72 jenis |
| 4.5.1 | Meningkatnya indeks daya beli masyarakat | Indeks daya beli masyarakat | 65 | n/a | 64,47 | Data dari BPS | | | | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | | Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 | 444.959 orang | 1.808.544 orang | 427.367 orang | 899.097 orang | 409.367 orang | 831.152 orang | 391.567 | 686.121 | 373.736 orang | 596.046 orang |
| 4.6.1 | Menurunnya jumlah KK miskin | Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota | 25% | n/a | 26,04% | | 27,09% | Data dari BPS | 28,14% | Data belum ada | 29,19% | n/a |
| 4.7.1 | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Jumlah kasus | 53 kasus | 65 kasus | 56 kasus | 53 kasus | 59 | n/a | 26 kasus | 60 kasus | 28 kasus | 56 kasus |
| 4.8.1 | Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | Penurunan PMKS 5% di tahun 2018 | Dirubah | dirubah | Dirubah | dirubah | Dirubah | dirubah | 29.919 orang | 102.702 orang | 30.407 orang | 84.443 orang |
| | Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan | Jumlah peningkatan penanganan PMKS 5% pada tahun 2018 | 5% (3.685 orang) | n/a | 1% (737 orang) | 813 orang | 1% (737 orang) | 123 orang | | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi |
| | sosial (PMKS) | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 | Terpenuhinya kesetaraan gender | Rasio gender diatas 30% perempuan | 40% | 3% | 38% | 30% | 36% | 0 | 34% | 0% | 32% | n/a |
| Misi ke-5: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan | Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif) | 5% | n/a | 4,2% | | 3,6% | n/a | 2,9% | 0,34% | 2,20% | n/a |
| 5.1.2 | Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW | Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW | 10% | 10% | 8,6% | 10% | 7,2% | n/a | 5% | 7,2% | 4% | n/a |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Misi ke-6: Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat | Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018 | 9,81% | 1,9% | 9,64% | | 9,48% | n/a | 9,88% | 10,0008% | 9,84% | n/a |
| | | Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun | | | | | Dihapus | dihapus | 68% | Na | 64% | n/a |
| 6.1.2 | Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman | Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha | Dihapus | dihapus | Dihapus | dihapus | Dihapus | dihapus | 0,4 Ha | Na | 0,4 Ha | n/a |
| 6.1.3 | Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup | Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi | | | | | | | Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | | | | | | | | | n udara udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi | udara 5 lokasi, air sungai 7 lokasi, air laut 3 titik | udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi | air sungai 15 lokasi |
| | | Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome) | 90% | 69,6 | 88% | 84,6 % | 86,5 0% | 79,5 | | | | |
| | | Air sungai (lokasi) meningkatnya pelayanan konservasi SDA (rata-rata outcome) | 100% | 79,6% | 80% | 80% | 60% | 60% | | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome) | 80% | 69,6 | 69,60% | 69,60% | 59,2% | 58,2% | | | | |
| | | Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan % (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%) | 78% | 77,5% | 74,40% | 74,40% | 76,50% | 76,36% | | | | |
| 6.1.4 | Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan | Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80% | 80% | 80% | 78% | 78% | 76% | n/a | 74% | 73% | 72% | n/a |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi |
| | berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA | Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20% | 100% | n/a | 99,38% | 95,33% | Dihapus | dihapus | 5% | 5% | 1% | n/a |
| 6.2.1 | Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat | Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% | 100% | 100% | 98% | 99,39% | 98,74% | 89,44% | 98,10% | 80% | 96,80% | 90% |
| | | Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100% | 100% | 100% | 98% | 90,41% | 96% | 92,52% | 94% | 91,83% | 92% | 98% |
| 6.2.2 | Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim | Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik | 10 titik | 8 titik | 12 titik | 12 titik | 14 titik | 2 titik | 16 titik | 2 titik | 17 titik | 17 titik |
| 6.2.3 | Tersedianya sistem pengelolaan | Cakupan pelayanan air limbah domestik | 100% | 100% | 98% | 99,39% | 96% | 100% | 94% | 100% | 92% | 92% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | jaringan air limbah domestik secara optimal | Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga) | 76,45% | 90,32% | 74,16% | 74,16% | 71,87% | 87,73% | 69,58% | 89,32% | 67,29% | n/a |
| 6.2.4 | Tersedianya sistem pengelolaan air minum | Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80% | 80% | 75,89 | 78% | | 76% | 0 | 74% | 93,47% | 72% | n/a |
| 6.3.1 | Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten | Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus. | 0 kasus | 0 kasus | 7 kasus | 10 kasus | 14 kasus | 10 kasus | 10 | 10 | 10 Kasus | 10 Kasus |
| 6.4.1 | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan | Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%. | 20 % | 24,4% | 52,59 Ha (1,38%) | 27,472 Ha | 70,09 Ha (1,84%) | 59,6 Ha | 26% | 3,22% | 28% | 28% |
| 6.4.2 | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah. | 16,256 rumah | 846 rumah yang diperbaiki | 16.696 rumah | 16.696 rumah | 17.576 rumah | 15.565 rumah | 15.056 rumah | 2000 rumah | 16.756 rumah | n/a |
| 6.4.3 | Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang | Cakupan wilayah pelayanan angkutan | 90% | 100% | 88% | 90% | 86% | 80% | 84% | 84% | 82% | 60% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2018 | | Tahun 2017 | | Tahun 2016 | | TAHUN 2015 | | TAHUN 2014 | |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi |
| | terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang | umum | | | | | | | | | | |



3.3. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Sebagai upaya pencapaian target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2018. Penggunaan anggaran belanja daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kinerja tahun Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018, rincian penggunaan APBD Kota Cirebon Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Tabel 3. 4Tabel Penggunaan Anggaran dan Program

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| 1.1.1 | Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan | Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100% | 100% | 45% | 45% | program peningkatan kualitas religius aparatur | 429,035,250 | 416,440,000 | 97.06 |
| 1.2.1 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan | Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan | 90% | n/a | | program peningkatan kualitas sarana peribadatan | 39,907,500 | 39,907,500 | 100 |
| 1.2.2 | Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan | Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi | 6 besar tingkat provinsi | n/a | | program peningkatan kompetensi keagamaan | 2,038,544,400 | 1,981,069,563 | 97.18 |
| 1.2.3 | Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran | Tidak ada kasus konflik yang bernuansa agama | 0% | 0% | | program kerukunan umat beragama | 540,312,500 | 520,306,500 | 96.30 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | agamanya masing-masing | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional | Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan | 100% | 72% | | program pendidikan kedinasan | 2,318,328,500 | 2,285,443,900 | 98.58 |
| | | Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun | 3 kasus / 1000 PNS | 4 kasus / 1000 PNS | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 4,612,369,975 | 4,403,381,490 | 95.47 |
| 2.1.2 | Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD | Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 | WTP | WTP | | program optimalisasi pengelolaan aset daerah | 1,072,839,000 | 990,050,140 | 92.28 |
| 2.1.3 | Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD | Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100% | 100% | 98,90 | | program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 380,578,000 | 369,085,330 | 96.98 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | | program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 760,361,000 | 664,379,519 | 87.38 |
| | | | | | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 356,325,000 | 295,345,000 | 82.89 |
| | | | | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1,371,722,800 | 1,095,749,100 | 79.88 |
| | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | | | | | | Program Pengembangan Data/Informasi | 236,245,000 | 218,035,000 | 92.29 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan | - | - | |
| 2.1.4 | Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah | Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan | 14/70 | | | program perbaikan sistem administrasi kearsipan | 125,946,000 | 125,646,000 | 99.76 |
| | | Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip | 1060 arsip digital | | | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | 13,463,000 | 13,463,000 | 100.00 |
| 2.1.5 | Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan 95% | 90 poin | 78,87 poin | | program penataan dan pelayanan perijinan | 549,331,000 | 517,087,400 | 94.13 |
| 2.1.6 | Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi | Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon | 400 M (PMA) | 1.733 M (PMA) | | program peningkatan promosi dan kerjasama investasi | 174,762,500 | 156,451,150 | 89.52 |
| | | | 600 M (PMDN) | 1.620 M (PMDN) | | program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi | 43,389,500 | 26,606,500 | 61.32 |
| | | | PMDN (510 M) | | | | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| 2.1.7 | Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan | 90 poin | | | program pendaftaran penduduk | 968,047,400 | 954,820,779 | 98.63 |
| | | | | | | program pelayanan pencatatan sipil | 64,953,800 | 64,953,800 | 100.00 |
| | | | | | | program sistem informasi administrasi kependudukan | 183,428,000 | 176,201,200 | 96.06 |
| | | | | | | program perencanaan kebijakan kependudukan | | | |
| 2.2.2 | Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang representatif | Jumlah bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik | 80% | 80% | | | | | |
| 2.3.1 | Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan | 80 poin | 80 poin | | | | | |
| 2.3.3 | Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan | Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati | 25 titik | n/a | | program pembinaan pemerintahan | 46,175,000 | 5,442,000 | 11.79 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | kabupaten cirebon | 100% | | | | | | | |
| 2.4.1 | Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi | Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100% | 100% (1 peraturan e-government) | 100% (4 peraturan 3-government) | | program peningkatan infrastruktur teknologi informasi | 1,694,860,000 | 1,665,118,239 | 98.25 |
| | | Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100% | 50 sistem yang terbangun | 22 sistem yang terbangun | | | | | |
| 3.1.1 | Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an | Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | | program pengembangan wawasan kebangsaan | 51,930,250 | 47,942,800 | 92.32 |
| 3.2.1 | Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum | Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk | 15% | n/a | | program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 554,891,000 | 539,229,500 | 97.18 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik | 10 titik | 20 titik | | program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 1,517,092,012 | 1,452,579,543 | 95.75 |
| | | | | | | program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 482,736,000 | 452,700,700 | 93.78 |
| | | | | | | program pembinaan pemuda di daerah rawan ketertiban umum | | | |
| | | | | | | program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | 126,323,000 | 125,766,000 | 99.56 |
| 3.4.1 | Terwujudnya RW K-3 | Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50% | 50% | 50% | | | | | |
| 3.5.1 | Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan | Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan | 6 titik rawan kemaceta | 6 titik rawan kemaceta | | program pengendalian dan | 2,635,800,000 | 2,600,505,853 | 98.66 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | kecelakaan | n dan 2 titik rawan kecelakaan | n dan 2 titik rawan kecelakaan | | pengamanan lalu lintas | | | |
| | | | | | | program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan | 100,000,000 | 98,900,000 | 98.90 |
| | | | | | | program peningkatan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran | | | |
| | | | | | | program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | - | - | - |
| | | | | | | program peningkatan pelayanan parkir | 225,000,000 | 222,729,250 | 98.99 |
| 3.6.1 | Tertatanya sektor informal | Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL | 40% | 45,86% | | program penataan pedagang kali lima | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | seluruhnya | | | | | | | |
| 3.7.1 | Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana | Tingkat waktu tanggap dan tanggap kejadian waktu darurat bencana | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari | | program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 4,612,369,975 | 4,403,381,490 | 95.47 |
| | | | | | | program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 3,521,008,000 | 3,518,978,000 | 99.94 |
| | | | | | | program penanggulangan korban bencana | 28,330,000 | 27,675,000 | 97.69 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|--|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % | |
| 4.1.1 | Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan | Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun | 18 tahun | 13,08 | | program manajemen pelayanan pendidikan | 1,561,408,000 | 1,532,974,600 | 98.18 | |
| | | | | tahun | | | | | | |
| | | | | | | program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun | 38,046,676,500 | 37,607,884,569 | 98.85 | |
| | | | | | | program pendidikan menengah | | | | |
| | | | | | | program pelayanan pendidikan SMK | | | | |
| | | | | | | program pendidikan non formal | 1,051,429,000 | 1,046,783,945 | 99.56 | |
| | | | | | | program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan | 700,000,000 | 669,004,950 | 95.57 | |
| | | | | | program pendidikan anak usia dini (PAUD) | 1,658,571,000 | 1,652,807,000 | 99.65 | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | | program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | 559,961,000 | 537,177,300 | 95.93 |
| 4.2.1. | Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat | BOR (%) | 80,6 | 57,09 | | program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 315,913,000 | 294,412,800 | 93.19 |
| | | LOS (hari) | 4,48 | 4,20 | | program perbaikan gizi masyarakat | 1,780,204,200 | 1,778,204,200 | 99.89 |
| | | TOI (hari) | 1,27 | 3,11 | | program upaya kesehatan masyarakat | 51,026,861,575 | 49,846,555,107 | 97.69 |
| | | BTO (kali) | 43,35 | 12,68 | | program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | 873,430,700 | 872,160,700 | 99.85 |
| | | NDR (kematian 48 jam/1000) | 22,56 ‰ | 43,04 | | program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 1,720,026,850 | 846,997,600 | 49.24 |
| | | GDR (kematian kasar/1000) | 44,28 ‰ | 75 | | program pelayanan kesehatan penduduk | 2,384,636,100 | 2,375,623,338 | 99.62 |
| | | | | | | | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | | miskin | | | |
| | | Survei kepuasan pasien/pelanggan | 85% | 81,43 | | program pelayanan kesehatan lanjutan | 280,216,879,245 | 238,280,703,110 | 85.03 |
| | | KK ber-PHBS (%) | 75% | 75,22 | | program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 21,174,271,000 | 20,691,408,590 | 97.72 |
| | | Angka kematian ibu | 3 orang | 3 | | program peningkatan mutu RSUD gunung jati sebagai rumah sakit pendidikan | | | |
| | | Gizi buruk | 50 bayi | 17 | | | | | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar | < 1% | 0,17 | | | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (%) | 100% | 100 | | | | | |
| 4.2.2. | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS | 75% | 63,11 | | program keluarga berencana | 2,816,743,500 | 2,766,864,500 | 98.23 |
| 4.3.1. | Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi | Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018 | 10 besar tingkat provinsi | 10 besar tingkat provinsi | | program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga | 1,546,019,000 | 1,538,013,200 | 99.48 |
| | | | | | | program peningkatan sarana dan prasarana olah raga | 269,839,000 | 217,269,000 | 80.52 |
| 4.4.1. | Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan | Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 | 50% | 40,15% | | program pengelolaan keragaman budaya | 446,755,000 | 445,555,000 | 99.73 |
| | | | | | | program pengelolaan kekayaan budaya | 464,224,000 | 462,374,000 | 99.60 |
| | | Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan | 80% | 73% | | program pengembangan kerjasama pengelolaan | 144,427,500 | 143,922,500 | 99.65 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | cagar budaya di tahun 2012) | | | | kekayaan budaya | | | |
| 4.5.1. | Meningkatnya indeks daya beli masyarakat | Indeks daya beli masyarakat | 65 | n/a | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 76,130,000 | 74,603,000 | 97.99 |
| | | Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 | 444.959 orang | 1.808.544 orang | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 179,587,000 | 136,318,000 | 75.91 |
| | | | | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 254,867,500 | 238,783,500 | 93.69 |
| | | | | | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 201,067,500 | 200,503,500 | 99.72 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | | Program peningkatan kesempatan kerja | - | - | - |
| | | | | | | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 155,000,000 | 155,000,000 | 100.00 |
| | | | | | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | 716,444,000 | 712,639,084 | 99.47 |
| | | | | | | Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan | 429,072,500 | 424,347,000 | 98.90 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, peternakan dan perikanan | 290,000,000 | 287,126,945 | 99.01 |
| | | | | | | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | 373,450,000 | 368,467,000 | 98.67 |
| | | | | | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 957.580.000 | 967,136,920 | 947,357,200 |
| | | | | | | Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 116,044,000 | 112,788,000 | 97.19 |
| | | | | | | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 524,197,900 | 520,233,250 | 99.24 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | | Program pengembangan destinasi pariwisata | - | - | - |
| 4.6.1. | Menurunnya jumlah KK miskin | Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota | 25% | n/a | | Program satu data keluarga miskin | | | |
| | | | | | | Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan | 167,600,000 | 8,940,000 | 5.33 |
| | | | | | | Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin | - | - | - |
| | | | | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 2,384,636,100 | 2,375,623,338 | 99.62 |
| | | | | | | Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi dan listrik bagi keluarga miskin | - | - | - |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | | Program penataan kawasan perumahan masyarakat miskin | - | - | - |
| | | | | | | Program pelayanan akses pangan dan gizi bagi keluarga miskin | - | - | - |
| | | | | | | Program Pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin | - | - | pelaksanaan 2 tahun kebelakang di evaluasi terlebih dahulu di tahun 2016, sehingga anggaran tidak diberikan. |
| 4.7.1. | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Menurunnya kasus | 53 kasus | 65 kasus | | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 63,842,000 | 62,630,000 | 98.10 |
| | | | | | | Program RW layak anak | - | - | - |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| 4.8.1. | Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | Jumlah peningkatan penanganan PMKS 5% pada tahun 2018 | 5% (3.685 orang) | n/a | | Program pembinaan panti asuhan/panti jompo | - | - | - |
| | | | | | | Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS | 105,962,000 | 100,387,000 | 94.74 |
| | | | | | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 491,090,000 | 486,028,000 | 98.97 |
| 4.9.1. | Terpenuhinya kesetaraan gender | Rasio gender di atas 30% perempuan | 40% | 3% | | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan | 22,691,200 | 21,221,200 | 93.52 |
| 5.1.1. | Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang | Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak | 5% | n/a | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | 1,007,995,000 | 974,929,700 | 96.72 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | kecamatan | 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif) | | | | | | | |
| 5.1.2. | Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW | Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW | 10% | 10% | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | 608,847,000 | 602,787,610 | 99.00 |
| 6.1.1. | Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal | Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018 | 9,81% | 1,9% | | Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau | - | - | - |
| | | | | | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 125,010,000 | 125,010,000 | 100.00 |
| | | | | | | Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum | | | |
| 6.1.2. | Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup | Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome) | 90% | 69,6 | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | 787,025,650 | 715,376,050 | 90.90 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | | Hidup | | | |
| | | Air sungai (lokasi) meningkatnya pelayanan konservasi SDA (rata-rata outcome) | 100% | 79,6 | | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 210,447,500 | 208,259,400 | 98.96 |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome) | 80% | 69,6 | | Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat | 75,500,000 | 74,153,000 | 98.22 |
| 6.1.3. | Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA | Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80% | 80% | 80 | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 2,389,916,000 | 2,346,933,500 | 98.20 |
| 6.2.1. | Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang | Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% | 100% | 100% | | Program Pembangunan Jalan dan | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | mendukung akselerasi pergerakan masyarakat | | | | | Jembatan | | | |
| | | Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100% | 100% | 100% | | Program Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan dan Jembatan | | | |
| 6.2.2. | Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim | Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik | 10 titik | 8 titik | | Program pembangunan saluran drainase primer dan sekunder | | | |
| | | | | | | Program Rehabilitasi/Peeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder | | | |
| | | | | | | Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | | Program Pengendalian Banjir | | | |
| 6.2.3. | Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal | Cakupan pelayanan air limbah domestik | 100% | 100% | | | | | |
| | | Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga) | 76,45% | 90,32% | | | | | |
| 6.2.4. | Tersedianya sistem pengelolaan air minum | Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80% | 80% | 75,89 | | | | | |
| 6.3.1. | Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten | Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | |
| | | | | | | Program penyediaan sistem informasi pengendalian tata ruang | - | - | - |
| 6.4.1. | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan | Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 0,46% | 20 % | 24,4% | | Program Lingkungan Sehat Perumahan | | | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Kinerja | | Program | Anggaran | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|---|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | | | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % |
| 6.4.2. | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | 16.256 rumah | 846 rumah yang diperbaiki | | Program Pengembangan Perumahan | | | |
| 6.4.3. | Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang | Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum | 90% | 100% | | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | | | |
| | | | | | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 99,950,000 | 99,070,000 | 99.12 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Kondisi umum belanja daerah Kota Cirebon Tahun 2018 berdasarkan laporan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Rincian penggunaan APBD kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Pos Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 440.432.183.834,-
2. Dana Perimbangan Rp 814.145.269.518,-
3. Lain-Lain pendapatan yang sah Rp 168.396.364.498,-

Pos Belanja

1. Belanja Tidak Langsung Rp 674.059.990.646,-
2. Belanja Langsung Rp 751.994.586.537,-

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

| No. | Nama Program | Anggaran | Realisasi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 73,020,536,390 | 69,965,953,834 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 37,565,756,363 | 35,403,440,305 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 3,377,443,200 | 3,000,916,500 |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4,612,369,975 | 4,403,381,490 |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 6,656,517,200 | 6,321,634,830 |
| 6 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1,658,571,000 | 1,652,807,000 |
| 7 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 38,046,676,500 | 37,607,884,569 |
| 8 | Program Pendidikan Non Formal | 1,051,429,000 | 1,046,783,945 |
| 9 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 700,000,000 | 669,004,950 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Nama Program | Anggaran | Realisasi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1,561,408,000 | 1,532,974,600 |
| 11 | Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN | 39,422,822,013 | 37,903,061,748 |
| 12 | Non Program | - | 648,307,721 |
| 13 | Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan | 2,195,800,000 | 2,191,554,647 |
| 14 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 51,026,861,575 | 49,846,555,107 |
| 15 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 315,913,000 | 294,412,800 |
| 16 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 1,780,204,200 | 1,778,204,200 |
| 17 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 940,291,275 | 917,558,658 |
| 18 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 873,430,700 | 872,160,700 |
| 19 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 10,131,084,500 | 9,575,242,610 |
| 20 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 21 | Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan | 40,147,200 | 37,857,200 |
| 22 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak | 1,720,026,850 | 846,997,600 |
| 23 | Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan | 464,888,500 | 456,083,500 |
| 24 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 2,384,636,100 | 2,375,623,338 |
| 25 | Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | 189,363,400 | 189,363,400 |
| 26 | Program Pengamatan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan | 381,232,000 | 381,232,000 |
| 27 | Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan | 280,216,879,245 | 238,280,703,110 |
| 28 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | 21,174,271,000 | 20,691,408,590 |
| 29 | Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan | 3,690,855,000 | 3,619,166,389 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Nama Program | Anggaran | Realisasi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 30 | Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan | 6,845,064,193 | 6,139,995,165 |
| 31 | Program Penyelenggaraan Jalan | 95,855,714,000 | 37,580,384,705 |
| 32 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 10,506,508,105 | 10,450,642,400 |
| 33 | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | 100,000,000 | 99,225,000 |
| 34 | Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 22,303,433,000 | 22,056,973,300 |
| 35 | Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 38,568,823,314 | 38,458,102,550 |
| 36 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 296,291,000 | 243,541,000 |
| 37 | Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum | 183,926,000 | 182,291,000 |
| 38 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik | 522,025,000 | 518,569,000 |
| 39 | Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman | 21,050,880,500 | 20,858,698,700 |
| 40 | Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum | 6,698,835,604 | 34,231,600 |
| 41 | Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Umum Perumahan | 517,000,000 | 513,662,000 |
| 42 | Program Penyediaan Perumahan | 315,000,000 | 197,512,500 |
| 43 | Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh | 620,000,000 | 598,477,500 |
| 44 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 56,990,000 | 45,990,000 |
| 45 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 125,010,000 | 125,010,000 |
| 46 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 482,736,000 | 452,700,700 |
| 47 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 1,517,092,012 | 1,452,579,543 |
| 48 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 554,891,000 | 539,229,500 |
| 49 | Program Dukungan Kelancaran | 946,784,900 | 890,856,942 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Nama Program | Anggaran | Realisasi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | Penyelenggaraan Pemilihan Umum | | |
| 50 | Program Penegakan Peraturan Daerah | 294,745,000 | 270,137,100 |
| 51 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 3,521,008,000 | 3,518,978,000 |
| 52 | Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran | 107,889,000 | 107,419,000 |
| 53 | Program Penanggulangan Bencana | 735,080,000 | 729,202,000 |
| 54 | Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana | 47,597,500 | 47,554,000 |
| 55 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 51,930,250 | 47,942,800 |
| 56 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 27,073,000 | 27,004,000 |
| 57 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 418,210,000 | 406,985,300 |
| 58 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 491,090,000 | 486,028,000 |
| 59 | Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS | 105,962,000 | 100,387,000 |
| 60 | Program Penanggulangan Korban Bencana | 28,330,000 | 27,675,000 |
| 61 | Program Satu Data Keluarga Miskin | - | - |
| 62 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 201,067,500 | 200,503,500 |
| 63 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 155,000,000 | 155,000,000 |
| 64 | Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | 254,727,400 | 252,279,900 |
| 65 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 63,842,000 | 62,630,000 |
| 66 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan | 22,691,200 | 21,221,200 |
| 67 | Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 397,848,750 | 392,540,000 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Nama Program | Anggaran | Realisasi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 68 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 716,444,000 | 712,639,084 |
| 69 | Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan | 429,072,500 | 424,347,000 |
| 70 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 2,389,916,000 | 2,346,933,500 |
| 71 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 787,025,650 | 715,376,050 |
| 72 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 435,236,000 | 432,051,000 |
| 73 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 210,447,500 | 208,259,400 |
| 74 | Peningkatan Pengendalian Polusi | 74,615,000 | 74,615,000 |
| 75 | Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut | 46,156,000 | 45,820,000 |
| 76 | Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat | 75,500,000 | 74,153,000 |
| 77 | Program Pendaftaran Penduduk | 968,047,400 | 954,820,779 |
| 78 | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | 64,953,800 | 64,953,800 |
| 79 | Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | 183,428,000 | 176,201,200 |
| 80 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | 1,007,995,000 | 974,929,700 |
| 81 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | 608,847,000 | 602,787,610 |
| 82 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan | 425,663,100 | 412,430,200 |
| 83 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | 7,753,066,700 | 7,595,943,932 |
| 84 | Program RW Bersih | 846,124,400 | 802,499,100 |
| 85 | Program Pengendalian Penduduk | 156,100,000 | 154,593,000 |
| 86 | Program Keluarga Berencana | 2,816,743,500 | 2,766,864,500 |
| 87 | Program Penyuluhan dan Penggerakan | 908,900,000 | 906,482,030 |
| 88 | Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 247,320,000 | 247,320,000 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Nama Program | Anggaran | Realisasi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 89 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 99,950,000 | 99,070,000 |
| 90 | Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 100,000,000 | 98,900,000 |
| 91 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 611,500,000 | 602,584,000 |
| 92 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 2,635,800,000 | 2,600,505,853 |
| 93 | Program Peningkatan Pelayanan UPTD | 624,158,000 | 619,753,500 |
| 94 | Program Peningkatan Pelayanan Parkir | 225,000,000 | 222,729,250 |
| 95 | Penataan Peraturan Perundang-Undangan | - | - |
| 96 | Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | 212,510,000 | 184,338,000 |
| 97 | Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik | 257,485,000 | 255,197,550 |
| 98 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 725,999,900 | 719,526,603 |
| 99 | Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi | 154,130,000 | 152,698,430 |
| 100 | Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi | 374,475,000 | 355,596,000 |
| 101 | Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa | 1,090,000,000 | 1,088,410,000 |
| 102 | Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi | 1,694,860,000 | 1,665,118,239 |
| 103 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi | 3,115,224,000 | 2,825,115,850 |
| 104 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 179,587,000 | 136,318,000 |
| 105 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 76,130,000 | 74,603,000 |
| 106 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 254,867,500 | 238,783,500 |
| 107 | Program Pembentukan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis RW Untuk Keluarga Miskin | 420,055,000 | 268,438,250 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Nama Program | Anggaran | Realisasi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 108 | Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima | 248,531,000 | 223,460,000 |
| 109 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 174,762,500 | 156,451,150 |
| 110 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 43,389,500 | 26,606,500 |
| 111 | Program Penataan dan Pelayanan Perijinan | 549,331,000 | 517,087,400 |
| 112 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 680,000,000 | 676,748,300 |
| 113 | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | 126,323,000 | 125,766,000 |
| 114 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | 1,546,019,000 | 1,538,013,200 |
| 115 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 269,839,000 | 217,269,000 |
| 116 | Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 117 | Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | 208,366,000 | 207,428,000 |
| 118 | Program Persandian Komunikasi dan Informasi | 147,500,000 | 133,750,000 |
| 119 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 464,224,000 | 462,374,000 |
| 120 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 446,755,000 | 445,555,000 |
| 121 | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | 144,427,500 | 143,922,500 |
| 122 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 559,961,000 | 537,177,300 |
| 123 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 125,946,000 | 125,646,000 |
| 124 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 181,586,000 | 178,986,000 |
| 125 | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | 13,463,000 | 13,463,000 |
| 126 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | 62,600,000 | 61,800,000 |
| 127 | Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 116,044,000 | 112,788,000 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Nama Program | Anggaran | Realisasi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 128 | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 524,197,900 | 520,233,250 |
| 129 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 464,660,000 | 454,707,700 |
| 130 | Program Pengembangan Kemitraan | 684,140,000 | 672,498,000 |
| 131 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 290,000,000 | 287,126,945 |
| 132 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | 373,450,000 | 368,467,000 |
| 133 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 967,136,920 | 947,357,200 |
| 134 | Program Pencegahan Penyakit Hewan | 202,000,000 | 198,259,300 |
| 135 | Program Metrologi Legal | 149,297,000 | 110,353,632 |
| 136 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 179,520,000 | 177,632,425 |
| 137 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 106,232,000 | 104,766,500 |
| 138 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Standarisasi dan Pengawasan Kemetrolgian | 31,900,000 | 13,040,000 |
| 139 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 170,494,900 | 169,806,000 |
| 140 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 55,646,000 | 55,646,000 |
| 141 | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | 209,931,100 | 194,291,000 |
| 142 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 2,027,622,000 | 1,943,009,550 |
| 143 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 380,578,000 | 369,085,330 |
| 144 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 760,361,000 | 664,379,519 |
| 145 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 430,898,500 | 381,558,950 |
| 146 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 444,272,000 | 351,097,000 |
| 147 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 2,618,390,750 | 2,292,767,895 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Nama Program | Anggaran | Realisasi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 148 | Program Penataan Kelembagaan | 207,616,000 | 206,560,000 |
| 149 | Program Pembinaan Pemerintahan | 46,175,000 | 5,442,000 |
| 150 | Program Pembinaan Administrasi Umum | 84,956,000 | 79,789,000 |
| 151 | Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 429,829,000 | 340,829,500 |
| 152 | Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan | 996,735,000 | 904,747,822 |
| 153 | Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur | 429,035,250 | 416,440,000 |
| 154 | Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan | 39,907,500 | 39,907,500 |
| 155 | Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan | 2,038,544,400 | 1,981,069,563 |
| 156 | Program Kerukunan Umat Beragama | 540,312,500 | 520,306,500 |
| 157 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 6,285,142,000 | 4,854,441,409 |
| 158 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 371,952,500 | 350,427,500 |
| 159 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 356,325,000 | 295,345,000 |
| 160 | Program Pengembangan Data/Informasi | 236,245,000 | 218,035,000 |
| 161 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1,371,722,800 | 1,095,749,100 |
| 162 | Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 113,210,000 | 112,550,000 |
| 163 | Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan | 167,600,000 | 8,940,000 |
| 164 | Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 257,206,000 | 217,996,000 |
| 165 | Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah | 1,072,839,000 | 990,050,140 |
| 166 | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 3,630,052,300 | 3,522,792,227 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

| No. | Nama Program | Anggaran | Realisasi |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 167 | Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD | 1,947,800,000 | 1,440,357,624 |
| 168 | Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD | 680,877,000 | 514,506,800 |
| 169 | Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah | 630,076,000 | 589,463,000 |
| 170 | Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD | 302,650,000 | 302,095,000 |
| 171 | Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS | 142,000,000 | 132,355,250 |
| 172 | Program Pendidikan Kedinasan | 2,318,328,500 | 2,285,443,900 |
| 173 | Program Penelitian dan Pengembangan | 584,347,000 | 549,431,000 |
| | Total | 876,790,122,684 | 751,994,586,537 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat realisasi anggaran terhadap pencapaian visi dan misi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Dalam pelaksanaan program tersebut, penggunaan anggaran tampaknya belum memperhatikan skala prioritas kebutuhan, sehingga jika ditelaah lebih dalam terlihat bahwa penggunaan program yang bukan prioritas menggunakan anggaran yang lebih besar dibandingkan program yang memang menyangkut kebutuhan masyarakat kota Cirebon.

Penggunaan anggaran program yang bersifat rutin (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur) masih mendominasi sebagian besar penggunaan anggaran (Rp 112,773,692,129,-) atau sekitar 14,99% terhadap realisasi belanja daerah Kota Cirebon. Jika ditelaah lebih dalam terlihat bahwa keberadaan program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kota Cirebon, namun menggunakan anggaran yang cukup besar,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

contohnya adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang kegiatannya hanya berupa pengadaan pakaian dinas saja namun menghabiskan anggaran sampai dengan Rp 3,000,916,500,- atau sekitar 0,39% terhadap belanja daerah, namun jika dibandingkan dengan program yang langsung berdampak terhadap pencapaian visi dan misi contohnya Program Pendidikan Non Formal yang hanya menyerap anggaran sebesar Rp 1,046,783,945,- atau sekitar 0,13% terhadap belanja daerah.

Penentuan skala prioritas merupakan salah satu bentuk penggunaan efisiensi anggaran daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke depannya harus memperhatikan indikator sasaran dan sumber daya anggaran yang tersedia.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian RPJMD selama tahun anggaran 2018. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja pemerintah daerah kota Cirebon selama tahun 2018 menunjukkan beberapa keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD 2013-2018 dan telah memenuhi 44 sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator sasaran kinerja pemerintah daerah kota Cirebon juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah daerah kota Cirebon tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.572.686.574.342,- jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp 1.426.054.577.183,- atau 90,67%.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2018 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun secara eksternal, terhadap target capaian indikator sarana pemerintah daerah kota Cirebon. kekurangan yang terjadi selama tahun 2018 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah daerah Kota Cirebon tahun 2018 ini, secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas,



telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah daerah Kota Cirebon untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan Bab III terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon di masa mendatang, yaitu:

- a. Penetapan perencanaan yang smart (*spesific, measurable, achievable, and time bound*), sehingga indikator sasaran dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan baik.
- b. Penegasan perangkat daerah pengampu sasaran maupun indikator sasaran, dan meng"adap" sasaran maupun indikator sasaran yang tertuang dalam RPJMD ke dalam renstra perangkat daerah sehingga terdapat harmonisasi dan keselarasan pencapaian sasaran.
- c. Penggunaan skala prioritas terhadap penggunaan anggaran, sehingga indikator sasaran prioritas tinggi mendapatkan skala prioritas anggaran yang tinggi dibandingkan dengan indikator sasaran prioritas rendah.
- d. Menterjemahkan sasaran dan indikator sasaran menjadi target kinerja para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.